



PERJUANGAN RAKYAT SOPPENG MENENTANG  
IMPERIALISME BELANDA  
(1905—1942)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	21 - 10 - 97
Asal dari	Fak. Sastra
Penyaknya	2 GXP
Harga	HAJIAH.
No. Inventaris	97107160.
No. Rias	SKR. B. 97 NUR P.I.

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Sastra  
pada Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin

OLEH

**NURAHMA**

92 07 245

UJUNG PANDANG

1997

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA



Sesuai dengan Surat Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor : 647/J04.10.1/PP.27/1997 Tanggal 17 Maret 1997, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Ujung Pandang, 7 Agustus 1997

Konsultan I,

DR. Mukhlis Paeni

Konsultan II

Drs. Daud Limbugau, S.U.

Disetujui untuk diteruskan  
kepada Panitia Ujian Skripsi

D e k a n  
u.b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi,

Drs. Suriadi Mappangara, M.Hum.

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA




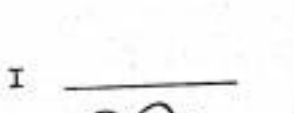
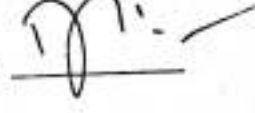

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Agustus 1997 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul :

PERJUANGAN RAKYAT SOPPENG MENENTANG IMPERIALISME  
BELANDA (1905 - 1942)

yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan/  
Program Studi Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas  
Hasanuddin.

Ujung Pandang, 20 Agustus 1997

Panitia Ujian Skripsi :

- |                                      |              |   |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Prof. Dra. Ny. Marrang P.M.Sc     | Ketua        |  |
| 2. Drs. Anwar Thosibo, M.Hum         | Sekretaris   |  |
| 3. Dr. Edward L. Poelinggomang, M.A. | Penguji I    |  |
| 4. Drs. Suriadi Mappangara, M.Hum    | Penguji II   |  |
| 5. Dr. Mukhlis Paeni                 | Konsultan I  |  |
| 6. Drs. Daud Limbugau, S.U.          | Konsultan II |  |

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena dengan taufik dan hidaya-nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra jurusan Sejarah dan Arkeologi pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Ada berbagai rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini, tetapi melalui ketekungan dan kerja keras yang disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, akhirnya penulisan skripsi ini dapat juga selesai pada waktunya.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis selalu membuka diri untuk menerima koreksi atau kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi yang sederhana ini. Koreksi atau kritik tersebut tidak saja berguna untuk memperbaiki karya penulis, tetapi juga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Selayaknyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Drs. Mustafa Makkah, M.S. selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Mukhlis Paeni dan Drs. Daud Limbugau, S.U. selaku konsultan I dan II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan yang tak mengenal lelah sehingga skripsi ini dapat penulis rampungkan.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
4. Karyawan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik.
5. Kedua orang tua yang tercinta dan segenap keluarga yang telah mengasuh, membimbing, dan berdoa demi tercapainya cita-cita penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan yang tulus kepada penulis selama ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Semoga pula karya ini dapat diterima sebagai sumbangan pikiran penulis untuk dapat memperkaya bacaan Sejarah Nasional Indonesia dan menjadi bahan bandingan dalam penulisan sejarah selanjutnya. Amin.

Ujung Pandang, ... Agustus 1997

Penulis

NURAHMA

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Alasan Memilih Judul .....	1
1.2 Masalah dan Batasan Masalah .....	4
1.3 Metodologi .....	6
BAB II. SELAYANG PANDANG DAERAH SOPPENG .....	13
2.1 Asal-usul Kerajaan Soppeng .....	13
2.2 Struktur Kekuasaan .....	16
2.3 Khirarki Kekuasaan .....	23
2.4 Dinamika Sosial Budaya .....	26
BAB III. IMPERIALISME BELANDA DI SOPPENG .....	34
3.1 Latar Belakang Kedatangan Imperialisme Belanda di Soppeng .....	34
3.2 Praktek Imperialisme Belanda di Soppeng .....	50
BAB IV. PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP IMPERIALISME BELANDA .....	56
4.1 Latar Belakang Perlawanan Rakyat .....	56
4.2 Proses Perlawanan Rakyat .....	62

4.2.1. Perlawanan Watanglipue La Palloge	62
4.2.2 Perlawanan Andi Muhammad Baso	
Balusu .....	69
4.2.3 Pergerakan Mistik .....	74
4.2.4 Pergerakan Dupa .....	82
4.2.5 Peristiwa Lajaroko .....	85
BAB V. KESIMPULAN .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Perjuangan rakyat Indonesia menentang Imperialisme Belanda secara umum dilatar belakangi oleh perjuangan di bidang politik, ekonomi dan keagamaan. Yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini adalah daerah soppeng, yang sengaja dipilih untuk mengetahui proses perlawanan rakyat dan akibat perlawanan rakyat menentang Imperialisme Belanda di daerah Soppeng.

Cara yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah penelitian lapangan (Field research) dan penelitian kepustakaan (Library research) dengan menggunakan metode Historis. Dari metode historis yang dipergunakan, menunjukkan hasil-hasil, yaitu : perlawanan rakyat di daerah Soppeng adalah wujud nyata bahwa rakyat di daerah ini dapat menentang penjajahan Barat di Indonesia. Mereka mengorbankan harta, jiwa dan raganya demi untuk mempertahankan pemerintahannya dan penentuan nasib bangsa sendiri.



## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1 Alasan Memilih Judul

Ilmu sejarah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai fungsi dan kegunaan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yakni sejarah sebagai pedoman dan petunjuk dalam menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang sejarah sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya dalam pengertian yang sangat luas merupakan cermin yang tidak hanya memantulkan wajah kemanusiaan dimasa lampau, melainkan mengandung kekuatan yang mampu mendorong manusia untuk berbuat pada masa kini, yang pada gilirannya sikap dan tindakan atas dasar dan pengalaman sejarah itu akan mempengaruhi masa depan manusia yang bersangkutan.

Menurut Ruslan Abdul Gani :

"Sejarah adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan dimasa lampau, beserta segala kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah progres masa depan" (Hugiono, 1987:4).

Rentetan kejadian yang ingin penulis ungkapkan dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari kejadian yang terjadi pada masa lampau dimana dalam peristiwa itu tersimpan suatu kesan atau nilai yang perlu diwariskan dari suatu

generasi ke generasi selanjutnya. Dalam upaya melestarikan nilai sejarah dari masa ke masa, maka kajian sejarah lokal Sulawesi Selatan memiliki aset sejarah yang cukup penting yang belum digali. Sudah tentu hal ini merupakan sumbangan untuk memperkaya perbendaharaan sejarah nasional, karena sejarah nasional ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekstra lokal (Abdullah, 1985:18).

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengungkapkan dan membahas sejarah lokal daerah Sulawesi Selatan, khususnya Soppeng. Penulis dalam hal ini ingin mengangkat judul : Perjuangan Rakyat Soppeng dalam Menentang Imperialisme Belanda antara tahun 1905-1942, dengan melihat berbagai aspek yang mendorong timbulnya penentangan tersebut sekaligus mengungkapkan dinamika masyarakat yang mendasari tindakan mereka. Penulisan sejarah yang bersifat lokal ini dimaksudkan adanya keterkaitan dengan sejarah nasional, yang semuanya akan memberi arti dalam mengungkapkan sejarah Indonesia. Oleh sebab itu sejarah sebuah negeri atau daerah harus dituliskan dalam rentetan proses perubahan mulai dari awal sejarah sampai perkembangannya sebuah negeri atau daerah tersebut.

Kendatipun pembahasannya hanya berkisar pada sejarah yang bersifat lokal, namun sesungguhnya tidak sedikit sumber pengetahuan yang ada dibalikinya. Mengingat pula bahwa penentangan terhadap imperialisme Belanda pada tahun

generasi ke generasi selanjutnya. Dalam upaya melestarikan nilai sejarah dari masa ke masa, maka kajian sejarah lokal Sulawesi Selatan memiliki aset sejarah yang cukup penting yang belum digali. Sudah tentu hal ini merupakan sumbangan untuk memperkaya perbendaharaan sejarah nasional, karena sejarah nasional ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekstra lokal (Abdullah, 1985:18).

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengungkapkan dan membahas sejarah lokal daerah Sulawesi Selatan, khususnya Soppeng. Penulis dalam hal ini ingin mengangkat judul : Perjuangan Rakyat Soppeng dalam Menentang Imperialisme Belanda antara tahun 1905-1942, dengan melihat berbagai aspek yang mendorong timbulnya penentangan tersebut sekaligus mengungkapkan dinamika masyarakat yang mendasari tindakan mereka. Penulisan sejarah yang bersifat lokal ini dimaksudkan adanya keterkaitan dengan sejarah nasional, yang semuanya akan memberi arti dalam mengungkapkan sejarah Indonesia. Oleh sebab itu sejarah sebuah negeri atau daerah harus dituliskan dalam rentetan proses perubahan mulai dari awal sejarah sampai perkembangannya sebuah negeri atau daerah tersebut.

Kendatipun pembahasannya hanya berkisar pada sejarah yang bersifat lokal, namun sesungguhnya tidak sedikit sumber pengetahuan yang ada dibalikinya. Mengingat pula bahwa penentangan terhadap imperialisme Belanda pada tahun

1905 - 1942 ini belum pernah dikaji secara ilmiah sehingga menyadarkan penulis untuk melakukan studi mengenai peristiwa tersebut. Jika permasalahan kesejarahan semacam itu tidak dikaji dan dipublikasikan sendiri maka bisa saja lenyap ditelan masa. Kenyataan yang demikian tentunya tidak dapat kita pungkiri.

Alasan lain yang mendorong penulis sehingga mengkaji obyek ini adalah untuk menggugah kesadaran generasi masa kini dan masa yang akan datang menyadari sepenuhnya bahwa banyak nilai-nilai luhur dari aspek terjang para pejuang yang masih relevan bila diterapkan pada masa sekarang. Antara lain kesetiakawanan sosial dari kerelaan berkorban baik harta maupun nyawa, hingga dengan demikian generasi yang ada itu mau mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pejuang bangsa dan mengisinya dengan pembangunan. Sehubungan dengan itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Kansil dan Julianto (1988:1), bahwa :

"Agar dapat lebih memahami makna dan peristiwa terasa perlu mengetahui secara mendalam serta lebih terperinci tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sebelumnya, peristiwa-peristiwa yang mengawali tercetusnya peristiwa tersebut".

Semoga penulisan ini tidak hanya merupakan lembaran dokumentasi dari lintasan sejarah perjuangan dimasa lampau saja, melainkan perlu dipergunakan sebagai sumber dari cermin bagi kita yang sekarang ini dan generasi yang akan datang.

## 1.2. Masalah dan Batasan Masalah

Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Imperialisme Belanda pada periode ini merupakan perjuangan secara massal karena seluruh lapisan rakyat Indonesia ikut berjuang menentang penjajahan Barat. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Imperialisme Belanda secara umum dilatarbelakangi oleh perjuangan dibidang politik yang mana kebencian golongan raja-raja dan bangsawan Indonesia terhadap pemerintah Belanda yang menyebabkan kemunduran kekuasaan mereka, dibidang ekonomi yaitu kebencian golongan pedangang Indonesia terhadap Belanda yang mematiakn mata pencaharian mereka, dan dibidang keagamaan kebencian terhadap Belanda berdasarkan ajaran agama Islam.

Upaya Belanda untuk menanamkan kekuasannya dalam rangka menguasai aspek kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia diberbagai bidang, terutama bidang politik adalah usaha untuk mengikat raja-raja Indonesia, dengan cara pemaksakan penandatanganan pernyataan pendek (korte verklaring). Adapun ringkasan dari pernyataan itu, antara lain sebagai berikut ;

1. Raja-raja mengakui daerahnya sebagai bagian dari Hindia Belanda.
2. Raja-raja berjanji tidak akan berhubungan dengan sesuatu pemerintahan lain.
3. Raja-raja mengaku tunduk kepada pemerintah Belanda.



Sikap imperialisme Belanda tersebut, berarti upaya dominasi politik yang pada gilirannya akan terjadi penguasaan selanjutnya berupa eksploitasi ekonomi oleh Belanda terhadap negara dan bangsa Indonesia. Akibatnya timbullah perlawanan rakyat Indonesia sebagai wujud nyata kecintaan pada pemerintah dan penentuan nasib bangsa sendiri, terutama sikap bangsa Indonesia yang anti pada bentuk penjajahan diatas dunia. Kebebasan menentukan nasib sendiri dan sikap anti penjajahan dalam segala bentuknya bagi bangsa Indonesia adalah suatu hak dan mempunyai makna yang luhur dan mendalam, bukan semata-mata membebaskan diri dari belenggu penjajahan, tetapi bebas dari segala kemiskinan, kebodohan dan lain-lain, demi untuk kesejahteraan rakyat.

Penelitian mengenai perlawanan atas kedatangan Imperialisme Belanda ini dilakukan dengan mengambil ruang lingkup spasial pada satu wilayah tertentu yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Soppeng. Daerah Soppeng sebagai sasaran studi ini, kehadirannya dalam pentas sejarah tidak bisa dilepaskan dari riak peristiwa yang terjadi di daerah lain dalam propinsi Sulawesi Selatan. Pembatasan wilayah Kerajaan Soppeng sebagai bagian yang otonom bagi penelitian dan penulisan ini bukan saja merupakan pilihan yang lebih mudah dan lebih memungkinkan bagi penelitian secara empiris tetapi juga secara metodologis lebih dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.



Meskipun batasan spasial lebih ditekankan pada wilayah kerajaan Soppeng namun tidak menutup kemungkinan wilayah atau kerajaan lain yang ada disekitarnya juga dimasukkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Tampilnya rakyat Soppeng menentang Imperialisme Belanda merupakan masalah yang sangat menarik untuk diungkapkan. Berdasarkan anggapan tersebut maka untuk memahami gejala yang ada penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada tulisan ini, yaitu :

1. Mengapa rakyat di Soppeng menentang Imperialisme Belanda antara tahun 1905 - 1942 ?
2. Apa akibat dari perjuangan rakyat melawan Imperialisme Belanda di Soppeng antara tahun 1905 - 1942 ?

Dalam kajian ini batasan temporalnya dimulai dari masuknya Belanda di Soppeng tahun 1905 - 1942, karena pada tahun 1905 merupakan awal terjadinya revolusi fisik yang ditandai dengan upaya Belanda untuk menduduki daerah Soppeng, dan pada tahun tersebut para pemimpin perlawanan rakyat berhasil ditangkap oleh kolonial Belanda. Revolusi ini berlangsung sampai beralihnya pemerintah ke tangan Jepang pada tahun 1942.

### 1.3. Metodologi

Penulisan sejarah adalah suatu rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau umat manusia berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses intelektual, kritis



kritis dan konstruktif berdasarkan metode sejarah. Peristiwa masa lampau itu hanyalah satu kali terjadi untuk mengingat masa lampau itu, historiografi dalam hal ini memegang peranan penting yang sedapat mungkin mendekati penulisan yang obyektif dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu.

Dengan demikian bahwa berbobot tidaknya suatu karya ilmiah yang dihasilkan tergantung dengan metode yang digunakan baik dalam tahap pengumpulan data maupun dalam tahap penulisan. Metode sejarah dapat diartikan sebagai proses menghasilkan untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan masa lampau, secara analitis kritis yang meliputi usaha sintesa agar menjadikan penyajiannya dapat dipercaya (Gottschalk, 1986 : 32).

Pada prinsipnya, mengungkapkan kejadian sejarah secara obyektif tidaklah mungkin. Karena seorang penulis merupakan subjek yang dipengaruhi oleh pikiran dan jiwa zamannya. Hal yang menjadi tuntutan disiplin ilmu sejarah adalah mendekati keobjektifan, agar karya sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam menghadapi gejala historis yang kompleks, setiap rekonstruksi menuntut adanya pendekatan yang memungkinkan penyaringan data yang diperlukan. Suatu koleksi akan dipermudah dengan adanya konsep sintesis sejarah (Kartodirjo, 1992 : 4). Olehnya itu untuk memahami kondisi politik pada periode 1905 - 1942, penulis menggunakan teori struktural (Ankersmit, 1987 : 269) yang

dipadukan dengan pendekatan politikologis. Dengan pendekatan ini aspek-aspek yang menjadi sorotannya adalah kekuasaan, jenis kepemimpinan dan konflik yang terjadi termasuk perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan.

Walaupun sejarah tidak memiliki teori tersendiri, tetapi sejarah kaya dengan teori yang dipinjam dari ilmu lain. Dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah, teori dipakai. Namun bukan untuk mendukung teori, tetapi teori yang mendukung fakta. Fakta muncul dari sumber-sumber yang dikaji berdasarkan teori yang dipilih, dimana teori hanya merupakan alat untuk mempertajam analisis dan sintesis sejarah (Budiarjo, 1982 : 96).

Dalam usaha mengungkapkan dan merekonstruksi objek permasalahan ini diperlukan cara kerja yang mantap agar dapat meringankan beban dan mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis. Cara kerja yang dimaksud adalah metode sejarah, menurut Nugroho Notosusanto (1971:17), metode sejarah memiliki tahapan kerja sebagai berikut:

1. Heuristik, yakni kegiatan menghimpun jejak masa lampau.
2. Kritik, yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya.
3. Interpretasi, yakni menetapkan makna dan saling hubungan dari pada fakta-fakta yang diperoleh itu.
4. Penyajian, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah.

Berpedoman pada metode historis di atas, maka penyusunan skripsi ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

## 1. Heuristik atau Pengumpulan Data

Heuristik atau pengumpulan data adalah tahapan kerja pertama dalam menyusun skripsi ini. Metode ini, berupa mencari atau mengumpulkan data atau sumber yang ada hubungannya dengan perjuangan rakyat di Soppeng. Hal ini ditempuh dengan cara :

### a. Penelitian lapangan (Field Research)

Kegiatan ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

#### 1. Observasi atau pengamatan

Observasi adalah pengamatan langsung pada lokasi penelitian, guna memperoleh bahan komparasi dengan sumber lainnya, seperti buku-buku sejarah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat di Soppeng atau hasil wawancara dengan pelaku-pelaku sejarah di daerah itu.

#### 2. Wawancara atau interview

Cara wawancara atau interview, dilakukan dengan tanya jawab langsung para pelaku atau yang memahami peristiwa yang terjadi di Soppeng, yaitu Drs. Salam Baco dan Andi M. Palar Yusuf.

### b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji sumber data melalui literatur yang memuat tentang perjuangan rakyat di Soppeng, atau yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

Adapun literatur yang dikaji, antara lain: Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan oleh Muhammad Abduh, Sejarah Ringkas Kerajaan Soppeng dan Sejarah Gowa oleh Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng oleh Pananrangi Hamid, Sejarah Perjuangan Masyarakat Desa Donri-Donri Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Semasa Penjajahan Belanda sampai masa Kemerdekaan oleh Mahmud Husein, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945 - 1950) oleh Harun Kadir dkk, La Toa oleh Mattulada, Arus Revolusi di Sulawesi Selatan oleh Sarita Pawiloy dan Islamisasi di Kerajaan Soppeng oleh Sofyaningsih dan sebagainya.

## 2. Kritik atau Penilaian Data

Setelah data-data itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya dengan lengkap, maka diadakan seleksi data untuk menguji kemampuan tingkat validitas data; sehingga dapat diadakan pemisahan data yang dapat diterima dengan data yang masih spekulatif atau palsu, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh fakta-fakta sejarah yang akurat.

Tahapan kerja kritik merupakan suatu usaha menganalisa data yang didapatkan, dinilai secara kritis dengan menyelidiki sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.

Kritik sejarah adalah penulisan atau penyaringan sumber-sumber sejarah yang diperoleh. Setiap sumber sejarah dilakukan kritik, sehingga dapat dipisahkan antara sumber yang asli dengan sumber yang palsu. Hasil dari kritik sejarah ialah penemuan fakta sejarah yang sungguh-sungguh sesuai dengan peristiwanya.

Kritik sumber terbagi atas dua macam, yaitu kritik luar dan kritik dalam. Kritik luar adalah penilaian data yang berusaha memastikan keaslian sumber, seperti mencari keaslian bahan, waktu dan bahasa yang dipergunakan. Kemudian kritik dalam adalah penilaian data dengan menelitinya dan menghubungkan dengan fakta sejarah dengan yang termuat dalam sumber yang bersangkutan, kecuali itu dapat pula dikaitkan dengan bahan itu sendiri.

Kritik sumber sejarah merupakan salah satu prosedur kerja dari metode sejarah yang dianggap sangat penting karena sering dilakukan pembaharuan sumber-sumber berhubung sumber sejarah yang telah usang atau robek.

### 3. Interpretasi atau Penafsiran

Pada tahapan ini, data yang telah dikritik diberikan tafsiran atau arti tanpa meninggalkan sifat ilmiahnya. Tafsiran ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan (konklusi), sebagai bahan dalam menyusun kisah sejarah



#### 4. Penyajian atau Historiografi

Penyajian merupakan tahapan akhir dari seluruh tahapan dalam penyusunan sumber-sumber sejarah. Dengan merekonstruksi sejumlah fakta sejarah yang telah diberikan tafsiran, sehingga tersusun dalam bentuk cerita seperti skripsi ini. Penguraian skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yakni suatu penggambaran peristiwa-peristiwa sejarah yang dilukiskan mengenai perjuangan rakyat Soppeng menentang Imperialisme Belanda antara tahun 1905 - 1942, akan dijelaskan secara kronologis rentetan peristiwa, sehingga pada keseluruhan isi skripsi ini akan terlihat deskripsi perjuangan rakyat di daerah Soppeng.

Adapun pengertian Imperialisme menurut Cahyo Budi Utomo (1995:1), yaitu : Imperialisme adalah usaha suatu bangsa untuk memperluas daerah jajahan baik dengan jalan menaklukkan negeri-negeri maupun dengan jalan merampas daerah-daerah.

Berdasarkan kutipan diatas jelaslah bahwa Imperialisme Belanda adalah semata-mata untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara dengan mengambil hasil dari daerah yang dijajahnya.



## BAB II

### SELAYANG PANDANG DAERAH SOPPENG

#### 2.1 Asal Usul Kerajaan Soppeng

Asal mula nama Soppeng sampai pada dewasa ini masih terdapat dua versi yang timbul dari kalangan masyarakat setempat, yakni antara lain sebagai berikut :

1. Nama Soppeng itu diambil dari nama sebuah pohon yang buahnya menyerupai anggur berwarna yang orang menyebutnya 'Buah Caloppeng atau Coppeng'.
2. Nama Soppeng itu diambil dari gabungan kata 'Sosso' dan kata 'Lappeng' yang artinya sekelompok penduduk yang turun dari Sewo ke tempat daerah istana yaitu Lappeng. (Hamid, 1991: 14-15)

Versi yang pertama menyatakan bahwa nama Soppeng itu diambil dari sebuah pohon yang buahnya menyerupai anggur berwarna, yang disebutnya pohon Caloppeng atautah buah Coppeng. Menurut riwayat bahwa didekat bekas istana kerajaan Soppeng, tumbuh sebuah pohon Caloppeng (Coppeng) yang sangat besar. Untuk menyatakan kebesaran itu maka bunyi "C" pada Coppeng menjadi "S" pada Soppeng. Berdasarkan uraian di atas, lahirlah dugaan bagi masyarakat sendiri bahwa kemungkinan dari kata Caloppeng menjadi Soppeng yang memang pohon ini diakui dahulu kala banyak tumbuh di daerah Soppeng.

Versi kedua menyatakan bahwa nama Soppeng itu diambil dari gabungan kata Sosso dan kata Lappeng yang artinya





sekelompok penduduk turun ke tempat dekat istana Datu Soppeng yang disebut Lappeng. Versi ini mempunyai alasan bahwa dari sudut penggunaan bahasa Bugis, yakni dengan melalui perubahan kata-kata sederhana dan kemudian menggabungkannya menjadi satu kata.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bukunya Pananrangi Hamid (1991:16) yang menyatakan sebagai berikut :

"..... Soppeng diambil dari kata SOSSO + LAPPENG, jadi SO (SSO) + (LA) PPENG. Maksudnya bahwa orang Soppeng itu (SOSSO) dari Sewo ke Lappeng. Lappeng ialah sebuah tempat didekat bekas istana Datu Soppeng. SOSSO berarti turun atau pindah."

Tampak secara jelas dalam kutipan diatas ini, bahwa nama Soppeng itu merupakan hasil penggabungan dari dua kata Bugis, yaitu kata SOSSO dan kata LAPPENG. Sosso yang diambil kata depannya dan kemudian digabungkan dengan kata Lappeng yang diambil kata akhirnya (SO + PPENG = SOPPENG). Dalam hal ini nampaknya merupakan suatu riwayat asal usul masyarakat Soppeng itu berasal dari Sewo kemudian turun mencari suatu tempat, yang kemudian tempat itu dikenal daerah istana Datu Soppeng.

Demikian dikenal adanya dua versi mengenai asal usul dan pengertian nama daerah Soppeng. Satu sama lain mempunyai alasan-alasan yang kuat, namun demikian sampai sekarang belum diperoleh suatu kata sepakat mana diantara kedua versi tadi yang paling tepat. Hal tersebut tentu saja tidak mungkin dapat ditetapkan secara pasti tanpa

adanya suatu penelitian khusus dengan menggunakan sistem pendekatan antara disiplin ilmu pengetahuan.

Menurut sumber-sumber menyatakan bahwa disekitar tahun 1300 sebelum terbentuknya negeri Soppeng yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Soppeng, pada mulanya terdapat dua daerah yang merupakan negeri induk dari wilayah Soppeng yang didiami oleh dua tempat, yakni penduduk dari Gattareng dan penduduk dari Sewo. Dalam Lontara Soppeng ditemukan informasi sebagai berikut :

"ianae sure' poadadaenngi tanaE ri-Soppeng.....  
nawelainna Sewo. Gattareng. Noni mabbanua. Tauwe ri  
Soppeng. Naia to-SewoE. Iana riaseng to-Soppeng Riaja  
ia to-Gattareng. Iana poaseng Soppeng Rilau....."  
Artinya :

"Inilah kitab/bagian yang mewartakan tentang daerah Soppeng..... pada saat ditinggalkannya negeri Sewo dan Gattareng. maka turunlah orang-orang (penduduk negeri tersebut) untuk bermukim disuatu tempat, yaitu negeri Soppeng. Adapun orang-orang yang berasal dari Sewo disebut Soppeng Riaja, sedangkan mereka yang berasal dari Gattareng disebut kemudian sebagai orang Soppeng Rilau..... " (Hamid, 1991:13)

Dalam lontara Soppeng (salinan A.Pattegai) disebutkan bahwa kedua marga yang menduduki dua wilayah pemukiman tersebut diatas memiliki daerah otonom yang berdiri sendiri, yakni wilayah daerahnya masing-masing sebagai berikut :

"Wilayah Soppeng Rilau meliputi daerah-daerah Kubba, Panincong, LolloE, Mangkuttu, TalangaE ri Attang Salo, Akkampung, Maccile, Watu-Watu, sedangkan wilayah Soppeng ri Aja meliputi daerah-daerah Pising, Lawungan, Mattirobulu, Tinco, Liau, Lawo, Madello Rilau, Cenrana, Salokaraja, Mattoangin, Malaka, dan Ara" (Hamid, 1991:42-43).

## 2.2 Struktur Kekuasaan

Dalam lontara dikatakan bahwa sebelum terbentuknya Soppeng sebagai suatu kerajaan. Soppeng dilanda suatu huru-hara dimana terjadi kekacauan-kekacauan yang tidak henti-hentinya dikalangan masyarakat, kemiskinan dan kemelaratan timbul dimana-mana, saat itulah Soppeng mengalami suatu kehancuran. Akibat dari permasalahan tersebut diatas sepakatlah 60 Matowa atau pemuka masyarakat di daerah Soppeng untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi kemelut tersebut dan menuntun mereka ke arah masyarakat yang lebih stabil.

Tampillah Arung Bila (Matowa yang paling disegani dari keenampuluh Matowa) mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah besar, yang dihadiri 60 Matowa yang terdiri dari 30 Matowa dari Soppeng Riaja dan 30 Matowa dari Soppeng Rilau. Sementara musyawarah berlangsung, tiba-tiba terdengar suara dua ekor burung Kakatua diatas sebuah pohon. kedua burung Kakatua itu sedang berkelahi untuk memperebutkan setangkai padi yang berisi bulir-bulirnya. Akibat kedua ekor burung itu menimbulkan suara kegaduhan dan mengganggu para Matowa-Matowa yang sedang melaksanakan musyawarah. Matowa Arung Bila menyuruh Matowa-Matowa lainnya untuk menghalau dan mengikuti kemana mereka terbang. Kedua burung tersebut terbang masuk hutan sampai menghilang. Tiba-tiba mereka melihat sejumlah orang ditempat yang disebut "SEKKANYILI" Ditempat itulah

ditemukan seorang yang berpakaian indah sedang duduk diatas batu, dipayungi dengan payung besar yang dipegang oleh tiga orang (Abdul Razak, 1976:4).

Ketika bertanya Arung Bila diberitahu bahwa orang yang duduk diatas batu itu adalah orang yang turun dari khayangan bernama "PETTA MANURUNNGE RI SEKKANYILI". Mendengar perkataan ini, Matowa Arung Bila segera melakukan permufakatan dengan Matowa-Matowa yang lainnya untuk mengantar Petta Manurungge ri Sekkayili ke rumah Matowa Totinco yang terdekat dari hutan itu. Enam puluh orang Matowa menghadap dan mengemukakan harapan, yakni :

"Makkedani Matowa Ujung, Matowa Bila, Matowa Botto. Iyanamai kiengkang maelokki muammaseang, na ajanna muallajang. Naikona kipopuang, mudongiri temmatippakeng; musalipuri temma-dingikkeng; muwessei temma-kapekkeng. Naikona mpawakkeng rimawe, rimabela. Makkedai tomanurungge ri sekkanyili : Temmuabulec-coregga? Tamuwadduwa nawanawangga? sicepani matowa ennengge pulona silaong Puatta Manurungge ri sekayili, iatoppa upawadakko menneng, engkatopa sappusisekku Manurung ri Libureng. Madecekko laommalai muakkrengale iko ToSoppengge kidua sapprekko decemmu mennang. Iyanaro mupaddatau Soppeng ri-lau naiyya na Datu Soppeng riaja (Rahman Rahim, 1984:99-100).

Artinya :

Berkatalah Matowa Ujung, Matowa Bila, Matowa Botto. Sesungguhnya kami semua datang hendak mengharap belas kasihan, kiranya tuan tidak lagi menghilang. Tuanlah yang kami rajakan. Tuan menjaga kami seperti orang menjaga padi di sawah tak termakan burung, melindungi seperti kami diselimuti tak kedingan, menyatukan supaya kami tak berserak-serak, tuanlah yang membawa kami ke tempat yang

dekat dan jauh. Biar pun anak dan istri kami, jika tuan tidak berkenan, maka kami pun tak menyukainya. berkatalah To Manurunge di Sekanyili. Tidakkah kalian akan ingkar ? Maka serentaklah enam puluh orang Matowa saling bersepakat dengan to Manurung, kusampaikan pula kepada kalian bahwa ada juga sepupuku Manurung ri Libureng. Baik kiranya kalian rakyat Soppeng menjemput dan mengangkatnya supaya kami berdua memimpin kalian kepada yang baik. Dialah nanti kalian angkat Datu di Soppeng Barat, sedangkan kalian mengangkat saya Datu di Soppeng Timur.

Ketika mereka tiba di Libureng di tempat Manurung ri Gowa, mereka menemukan dia sedang duduk. Merekapun memohon seperti harapan yang di ucapkan kepada Manurunge ri Sekkanyili dan juga dia mengabulkan. Rakyat Soppeng yang membagi negerinya bagian barat dan bagian timur, sebenarnya adalah satu sekalipun dipimpin oleh dua orang Datu. Masing-masing Datu dibantu oleh seorang Panggepa (pendamping). Arung Bila menjadi pendamping Datu Soppeng Riaja, sedangkan Arung Botto menjadi pendamping Datu Soppeng Rilau, supaya tidak ganjil, mereka mengangkat seorang Matowa yang disebut Arung Ujungbulu. Berhubung dengan perkembangan pemerintahan di Soppeng, maka diangkatlah lagi seorang panggepa yang digelar Arung Salo Tungo, sehingga menjadi empat panggepa, dan tiga orang yang bergelar Pabbicara masing-masing bernama Arung Siddo, Arung Masewali dan Arung Jampu (Rahman Rahim, 1984:100).



Raja memegang SIWEKKENG ASE (segenggam padi dengan tongkatnya) dengan mengucapkan kalimat-kalimat yaitu :

"Lise'na ase de nalalo ri tigarokku narekko majekkoka ri lalengna apparaentangekku ri Addatuanna Soppeng"

Artinya :

"Isi padi tak akan masuk melalui kerongkongan saya bila berlaku curang dalam melakukan pemerintahan selaku Datu Soppeng" (Abdul Razak 1976 : 41).

Disamping itu rakyat Soppeng mempunyai kewajiban sebagai berikut : Taat pada pemerintah Raja dan turut memelihara dan menjaga keamanan daerah kerajaan serta menghormati tradisi yang berlaku.

Dengan melihat proses atau awal mula terjadinya pengangkatan Datu Soppeng, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi telah lama berkembang pada Kerajaan Soppeng hal mana setiap masalah yang ditimbulkan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat, pelekat dasar unsur demografi ini sejak datu yang pertama La Temmalala dinobatkan sebagai Datu Soppeng dan aturan ini berlaku turun-temurun sampai kepada Datu Soppeng ke-36.

Berdasarkan uraian di atas "Soppeng" telah menjadi kerajaan setelah La Temmalala dilantik pada tahun 1300, dimana beliau menduduki singgasana kerajaan selama 50 tahun lamanya yaitu tahun 1300 - 1350. La Temmalala sebagai pemimpin, sebagai seorang Raja (Datu) penguasa lokal yang mampu menunjukkan prinsip kepemimpinan seperti apa yang telah dikatakan Syukur Abdullah (1991 : 9) yaitu:

"Pertama, penguasa (dalam zaman manapun dan gelar apapun) hendaknya senantiasa berintegrasi kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, kebutuhan pokok harus dipenuhi, kedua, penguasa harus melindungi hak-hak setiap orang, hak-hak dasar yang menyangkut milik seseorang. Ketiga, penguasa dan aparat pemerintahan (adat) tidak boleh memeras rakyatnya.

Dalam pemilihan La' Temmalala sebagai Raja pertama ada satu teori yang digunakan untuk melihat masalah kepemimpinannya dalam memimpin Kerajaan Soppeng adalah Tori Elit. Kata Elit berasal dari bahasa latin "ELIGERE" yang berarti memiliki. Makna dari kata memiliki ini adalah dimaksudkan memilih manusia-manusia pilihan yang terbaik dalam masyarakat untuk menduduki jenjang tinggi dalam struktur sosial. Mereka yang telah dipilih itu adalah kelompok manusia yang telah melalui penilaian yang sangat selektif dari masyarakat atau paling tidak oleh kelompok sosial masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh. Kelompok elit adalah kelompok orang-orang terhormat dan terpendang dimata masyarakat. Oleh karena itu tingkah laku sosial budaya seringkali menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Prof.DR. Mattulada (1974 : 3) bahwa :

"Elit adalah orang-orang pilihan. orangutama bagian yang terbaik dari orang-orang dalam masyarakat dan kebudayaan. Elit adalah orang-orang yang sangat berpengaruh yang juga ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang lebih besar jumlahnya."

Dari pemaparan teori di atas, dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan secara keseluruhan proses kepemimpinan La Temmalala dalam usahanya memimpin Kerajaan Soppeng selama 50 tahun lamanya.



Datu Soppeng Riaja ManurungngE ri Sekkanyili yang bernama La Temmalala kemudian memperisterikan ManurungngE di Suppa' dan memperoleh seorang putera bernama La Maracinna yang kelak menggantikan ayahnya menjadi Datu Soppeng Riaja ke-2. Turunannya inilah yang memegang kedatuan sampai Datu Soppeng Riaja ke-11 yang bernama La Mataesso Puang LipuE. Setelah Baginda La Mataesso Puang LipuE wafat, maka Baginda digantikan oleh saudara kandungnya yang bernama "Lasekati Tosawamega Mallajangeri Asseleng" sebagai Datu Soppeng ke-12. Kemudian baginda digantikan oleh La Mappaleppe PatolaE, putera dari Baginda La Mataesso yang digelar Puang LipuE. Setelah Puang LipuE La Mappaleppa PatolaE wafat, maka Baginda digantikan oleh puteranya yang bernama "BeoE" sebagai Datu Soppeng yang ke-16 yang masa pemerintahannya pada tahun 1601 - 1620. Dalam tahun 1609 Datu Soppeng mulai memeluk agama Islam, sehingga Bagindalah yang pertama memeluk agama Islam di daerah Soppeng. Setelah BeoE wafat, maka Baginda digantikan oleh kemanakannya yang bernama La Tenri Bali sebagai Datu berikutnya.

Menurut silsilah Raja-Raja Soppeng, maka ada tiga puluh enam Raja atau Datu selaku pucuk pimpinan pemerintahan di dalam wilayah Kerajaan Soppeng, yaitu mulai dari To Manurung ri Sekkanyili sampai dengan Datu Soppeng yang terakhir yang bernama Haji Andi Wana, yang wafat pada tahun 1961 (Sofyaningsih, 1989:53).



### 2.3 Khirarkhi Dalam Kekuasaan

Situasi pemerintahan Kerajaan Soppeng, telah dimulai dari sistem kekuasaan yang dijalankan oleh Datu atau Raja pertama sampai dengan Datu yang terakhir adalah sistem pemerintahan monarki karena praktek pemerintahan kerajaan yang masih bersifat turun temurun. Dalam sistem kepemimpinan Kerajaan Soppeng, pada umumnya sama dengan sistem kepemimpinan pada kerajaan-kerajaan lainnya di daerah Bugis dan Makassar di masa lalu yaitu kekuasaan tertinggi terletak pada kepimpinan seorang Raja atau Datu. Raja beserta pemimpin-pemimpin lainnya terhimpun dalam suatu struktur birokrasi yang lebih rapi dan lengkap sesuai dengan tugasnya.

Pada masa kekuasaan Raja La Temmalala dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri kerajaan, sebagai berikut :

1. Arung Bila selaku Wakil Kepala Pemerintahan, dimana setiap harinya mendampingi Raja dalam Istana dan dialah sebagai penasehat Raja.
2. Arung Botto mengatur pemerintahan, mengkoordinir daerah-daerah Kerajaan yang terdiri dari tujuh lili. Beliau dapat diumpamakan Menteri Dalam Negeri. Lili-Lili yang dibawah koordinasim Arung Botto ialah :
  - Lalabata
  - Liliriaja
  - Lilirilau
  - Marioriawa
  - Marioriwawo
  - Pattojo
  - Citta
3. Arung Ujung mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan Kerajaan, dapat dimisalkan Menteri Luar Negeri.
4. Watang Lipu ialah yang mengatur urusan Pertanahan Kerajaan.

5. Tiga Pabbicara yang berfungsi :

- a. Dua orang Pabbicara mengurus urusan Kehakiman.
- b. Seorang Pabbicara mengurus segala sesuatu yang belum termasuk bidang tugas yang telah ditetapkan diatas. (Seksi Kebudayaan Kandep Dikbud Kabupaten Soppeng:8)

Selain lain jabatan-jabatan yang hanya diduduki oleh kerabat bangsawan diatas, juga ada beberapa jabatan-jabatan penting dalam sistem birokrasi tradisional yang diduduki oleh lapisan-lapisan orang-orang merdeka yang mendapat kepercayaan dari Raja (Datu) secara khusus menjaga dan bertanggungjawab tentang harta pusaka Raja dan juga memimpin berbagai upacara tradisional yang berhubungan dengan adat biasa disebut Kadhi (PETTA KALIE).

Dengan adanya pelimpahan wewenang Datu kepada para pembesar pemerintahan lainnya, maka praktis menunjukkan bahwa pelimpahan tugas itu merupakan ciri pemerintahan demokrasi dengan memperhatikan hasil-hasil musyawarah dan mufakat.

Seperti telah diketahui bahwa masyarakat Soppeng menganggap bahwa Datu itu adalah keturunan dari khayangan yang disebutnya "To Manurung" yakni berupa dewa yang menjelma menjadi manusia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kekacauan. Bertolak dari konsep Tomanurung itu, maka Raja atau Datu dipandang sebagai lambang pemersatu, pembawa suatu kemaslahatan umat manusia dalam Kerajaan Soppeng.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Raja bersama pemerintahan lainnya, misalnya Arung Bila, Arung Botto, Arung Ujung lainnya, bekerjasama dalam melaksanakan tugas-

tugas Kerajaan demi keberhasilan program yang telah ditetapkan bersama dengan memegang teguh prinsip kerja yaitu " Resopa temmangingngi namalomo naletei pammasena DewataE", artinya : Hanya dengan kerja keras yang tidak mengenal lelah dengan niat yang baik akan mendapatkan berkah dari Tuahan Yang Maha Esa.

Prinsip kerja tersebut, menunjukkan suatu kerja masyarakat Bugis yang dapat mendukung motivasi dan semangat kerja oleh para aparatur kerajaan dalam upaya pencapaian prestasi kerja aparat pada khususnya dan prestasi kerja masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kerajaan pada umumnya. Etos kerja kerajaan Bugis ini dapat memberikan peluang yang besar untuk mencapai keberhasilan program kerajaan yang telah ditetapkan oleh para pembesar pemerintahan melalui hasil musyawarah dan mufakat. Kemampuan kerja yang dimiliki setiap aparat/staf kerajaan merupakan tolak ukur pencapaian program kerajaan.

Apabila kita meninjau sistem kekuasaan kerajaan Soppeng, ternyata telah memperlihatkan struktur pemerintahan yang teratur dimana masing-masing pejabat telah ditentukan suatu wewenang, tugas dan tanggung jawab terhadap suatu profesi tertentu.

Pada tahun 1905 yaitu jatuhnya Soppeng ditangan Imperialisme Belanda, saat itu Soppeng dibawah pemerintahan Datu Soppeng XXXV (Sitti Zaenab Arung Lapadjung) sekaligus pertanda bagi penduduk Soppeng, bahwa mereka secara keseluruhan telah menjadi jajahan dari pihak Belanda.

Meskipun daerah Soppeng ditaklukkan oleh Belanda, namun struktur pemerintahan di daerah tersebut masih tetap seperti sediakala, yakni : tampuk pimpinan kerajaan Soppeng dipegang oleh Datu Soppeng, sedangkan dalam menjalankan pemerintahan kerajaan, Baginda Datu dibantu oleh para Pabbicara, Sullewatang dan Watang Lipu.

#### 2.4. Dinamika Sosial Budaya.

Stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat sangatlah penting untuk diketahui mengenai latar belakang, pandangan hidup, dan watak atau sifat mendasar dari suatu masyarakat. Hal ini perlu untuk diketahui hubungan dan kejadian dalam masyarakat yang menyangkut tingkah laku segenap kegiatan dalam masyarakat.

H.J. FRIEDERICY dalam disertasinya berusaha menggambarkan pelapisan orang Bugis-Makassar sebelum pemerintahan kolonial Belanda menguasainya secara langsung daerah Sulawesi Selatan. Menurut Friedericyc :

"Lapisan masyarakat Sulawesi Selatan pada hakekatnya ada dua lapisan pokok yaitu : Lapisan Anakarung dan Maradeka. Adapun Ata hanya merupakan lapisan sekunder. Hal ini mengikuti pertumbuhan pranata sosial dalam kerajaan Sulawesi Selatan" (Mattulada, 1995:30)

Sedang pelapisan sosial masyarakat di Kabupaten Soppeng dibedakan dalam beberapa tingkatan :

##### 1. Bangsawan, terdiri dari :

- Anak Mattola : prosentase kebangsawanannya 100% dengan gelar "Datu".



- Samiraja : prosentase kebangsawanannya 95 % dengan gelar "Datu".
- Sangaji : prosentase kebangsawanannya 90% dengan gelar "Datu".
- Rajeng Matasa : prosentase kebangsawanannya 85% dengan gelar "Petta Bau".
- Rajeng Malebbi : prosentase kebangsawanannya 80% dengan gelar "Petta Bau".
- Rajeng Bawang : prosentase kebangsawanannya 75% dengan gelar "Petta Bau".
- Sawi : prosentase kebangsawanannya 70% dengan gelar "Petta Lolo".
- Sawi : prosentase kebangsawanannya 65% dengan gelar "Petta Lolo".
- Sawi : prosentase kebangsawanannya 60% dengan gelar "Petta Lolo".
- Cera I : prosentase kebangsawanannya 50% dengan gelar "Petta Lolo".
- Cera II : prosentase kebangsawanannya 25% dengan gelar "Andi".
- Cera III : prosentase kebangsawanannya 12,5% dengan gelar "Todeceng".
- Seterusnya Cera IV, V, VI, VII, digelar Todeceng, untuk IV dan V, gelar IVE untuk VI dan VII.



2. To samak : adalah golongan orang kebanyakan atau bukan Ata, bukan pula bangsawan.
3. Ata : adalah golongan masyarakat yang dianggap lebih rendah tingkatannya, jika dibandingkan dengan kedua golongan lainnya. Mereka ini biasanya berasal dari para tawanan perang, dapat juga dari orang-orang yang diperjualbelikan (Hamid, 1991 : 134-135).

Akibat masuknya pengaruh Islam di daerah Soppeng, ternyata turut mewarnai bentuk dan corak stratifikasi sosial masyarakat, baik stratifikasi yang bersifat resmi maupun yang sifatnya tidak resmi. Stratifikasi yang secara resmi dan berdasarkan atas keturunan, memang tidak mengalami perubahan-perubahan dalam bentuk lahirnya sehingga tetap saja masih dikenal adanya tiga golongan masyarakat, yaitu kaum bangsawan, non bangsawan (orang merdeka) serta kaum hamba sahaya atau ata, namun demikian reaksi dari pada sistem stratifikasi sosial tersebut menjadi agak longgar jika dibandingkan dengan masa sebelum Islam. Mungkin hal itu disebabkan oleh prinsip ajaran Islam yang memandang manusia sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain kecuali hanya ditentukan oleh Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Golongan masyarakat semacam ini tidaklah didapatkan secara nyata dimasa kini, terutama kaum hamba sahaya atau ata. Kesemuanya ini semakin luntur akibat dari pembauran masyarakat terutama dengan adanya pengaruh ajaran-ajaran Islam, pendidikan, harta kekayaan dan pengaruh akibat penjajahan bangsa barat, sehingga stratifikasi sosial seperti tersebut kini tidak bisa dibedakan lagi, baik antara golongan bangsawan, non bangsawan (orang merdeka) maupun golongan ata.

Meskipun stratifikasi sosial semakin luntur, tetapi dari pengamatan penulis menyatakan bahwa masih banyak menunjukkan adanya sistem pelapisan sosial. Dari segi keturunan, hal ini nampak karena dalam pergaulan sehari-hari ia dapat dipanggil atau disapa di depan namanya dengan kata sapaan seperti : Datu, Puang, Pung, Bau, Andi, Petta, Daeng, Uwa dan lain-lainnya. Jadi sistem pelapisan sosial bagi kalangan bangsawan, dan non bangsawan tidaklah setajam seperti masa lampau.

Selanjutnya keadaan sosial budaya dalam suatu daerah memberikan suatu gambaran khusus akan masyarakat dalam daerah tersebut, oleh karena tiap daerah memiliki nilai-nilai budaya tersendiri. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sosial dimana masyarakat itu berada sebagai suatu kesatuan sosial yang memberikan berbagai macam tingkah laku yang kemudian menjadi kebiasaan karena

Golongan masyarakat semacam ini tidaklah didapatkan secara nyata dimasa kini, terutama kaum hamba sahaya atau ata. Kesemuanya ini semakin luntur akibat dari pembauran masyarakat terutama dengan adanya pengaruh ajaran-ajaran Islam, pendidikan, harta kekayaan dan pengaruh akibat penjajahan bangsa barat, sehingga stratifikasi sosial seperti tersebut kini tidak bisa dibedakan lagi, baik antara golongan bangsawan, non bangsawan (orang merdeka) maupun golongan ata.

Meskipun stratifikasi sosial semakin luntur, tetapi dari pengamatan penulis menyatakan bahwa masih banyak menunjukkan adanya sistem pelapisan sosial. Dari segi keturunan, hal ini nampak karena dalam pergaulan sehari-hari ia dapat dipanggil atau disapa di depan namanya dengan kata sapaan seperti : Datu, Puang, Pung, Bau, Andi, Petta, Daeng, Uwa dan lain-lainnya. Jadi sistem pelapisan sosial bagi kalangan bangsawan, dan non bangsawan tidaklah setajam seperti masa lampau.

Selanjutnya keadaan sosial budaya dalam suatu daerah memberikan suatu gambaran khusus akan masyarakat dalam daerah tersebut, oleh karena tiap daerah memiliki nilai-nilai budaya tersendiri. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sosial dimana masyarakat itu berada sebagai suatu kesatuan sosial yang memberikan berbagai macam tingkah laku yang kemudian menjadi kebiasaan karena

dilakukan berulang kali. Dalam Lontara Kerajaan Soppeng, Arung Bila pada abad XV, meletakkan ajaran dasar tentang nilai dasar dalam pengelolaan negara dan masyarakat Bugis (Soppeng) yang berintikan "Solidaritas kekeluargaan" menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan bersama, seperti tersirat dalam ajaran sebagai berikut :

"Ade Parujunna Tanae Ri Soppeng :

1. Akkasiorena Wanua, lolongeng to-maega ri dewata.
2. Sirebba tanggae ri adecengenna to maegae tessirebba pasorong.
3. Temmapasilaingeng ri pabattang, risalasanae.
4. Ia mawatang Ia mattimpu, Ia madodong Ia ritimpu.
5. Sienrekemmi tauwe ribulue, tessinoreng ritanete".  
(Syukur Abdullah, 1986:20)

Artinya :

Hukum dasar sebagai pedoman negeri Soppeng :

1. Ikatan antar Negara dan Rakyat terhadap Tuhan (Dewata).
2. Saling mengadu pendapat demi kebaikan rakyat (orang banyak), tetapi bukan bertentangan yang merusak.
3. Tak membedakan barang siapapun dihadapan hukum.
4. Yang kuat menyuapi yang lemah, yang lemah disuapi yang kuat.
5. Saling mengangkat, tidak saling menjatuhkan.

Kutipan tersebut di atas cukup jelas menggambarkan solidaritas Nasional dan pola hubungan antar rakyat dan pemerintah (Raja). Aktualisasi nilai budaya solidaritas yang tinggi seperti digambarkan oleh "Ade Parujunna Tanae ri Soppeng" rupanya masih terpelihara hingga dewasa ini di Soppeng.

Sebelum penyiaran Islam di Soppeng telah mempunyai suatu sistem norma dan aturan adat istiadat yang kuat dan luhur, seperti pantangan (pemmali). Masyarakat Soppeng masih banyak terikat pada beberapa upacara agama dan upacara adat sampai sekarang, seperti Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, baik yang dianggap secara tradisional maupun secara modern menurut ukuran mereka, kemudian upacara yang berhubungan dengan adat istiadat leluhur mereka yang dilakukan sejak dahulu kala, seperti upacara untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan dengan makhluk halus yakni upacara yang berhubungan dengan pertanian, adat perkawinan, upacara adat naik rumah baru, upacara adat kelahiran dan kematian, maccera' tappareng, maccera' arajan, upacara adat yang berhubungan dengan daur hidup seperti maccera' wattang, mappanololo dan sebagainya.

Upacara seperti tersebut di atas merupakan upacara mampakurusumat (syukuran) dan upacara mattula' bala (menolak bencana). Keseluruhan upacara baik upacara agama maupun upacara adat memang pada dasarnya upaya masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan keamanan.

Keseluruhan sistem norma agama dan adat tersebut dinamakan Pangngaderrang, yang diartikan sebagai cara seseorang bertingkah laku terhadap pranata sosialnya.

Sistem Pangngaderreng tersebut yang berlaku dalam masyarakat Soppeng merupakan warisan leluhur secara turun-temurun dan telah banyak berbaur dengan unsur-unsur dalam ajaran Islam. Menurut Mattulada, bahwa pangngaderreng, terdiri atas lima unsur yakni : 1) Ade', 2) Bicara, 3) Rapang, 4) Wari, 5) Sara' (Koentjaraningrat 1971 : 270). Kelima unsur pangngaderreng ini, merupakan satu kesatuan yang organis, terjalin dalam tingkah laku masyarakat Soppeng.

Kelima unsur pangngaderreng tersebut itulah yang tersimpul dalam gambar lambang Kabupaten Soppeng sekarang yakni pada bagian dada burung Kakatua. Makna dari kata-kata adat itu adalah sebagai berikut :

- a. Ade' maknanya keselarasan guna kebaikan umum,
- b. Rapang maknanya pedoman hukum,
- c. Bicara maknanya mufakat kepada yang bernilai tinggi atau peradilan,
- d. Wari' maknanya pembidangan dan pembatasan untuk ketegasan batas-batas dan kedudukan tiap hal,
- e. Sara' maknanya hukum agama" (Hamid, 1991:229)

Selain itu, siri' (harga diri) juga merupakan cerminan masyarakat didalam beringkah laku serta bertindak. Hal ini sesuai dengan ungkapan sebagai berikut :

1. Siri' emmi rionroang ri lino, artinya hanya harga diri sajalah, kita dapat hidup di dunia.
2. Mate ri siri'na, artinya mati dalam siri' atau mati demi menegakkan martabat atau harga diri, yang dianggap sesuatu hal yang terpuji dan terhormat.
3. Mate siri', artinya mati siri' atau orang yang sudah hilang harga dirinya dan tak lebih dari bangkai hidup" (Mattulada, 1995 : 63)



Latar belakang siri' inilah yang terpaut dalam perasaan keagamaan rakyat Soppeng, sehingga pada saat Belanda menjajah Indonesia, maka rakyat di Soppeng berjuang menentang Imperialisme Belanda antara tahun 1905 - 1942, perjuangan rakyat di Soppeng ketika itu telah mengorbankan harta, tenaga bahkan nyawa dikorbankan demi untuk membela kehormatan diri dan harga diri bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, nilai-nilai ini masih tertanam dengan kuatnya di daerah Soppeng sampai dewasa ini.

### BAB III

#### IMPERIALISME BELANDA DI SOPPENG

##### 3.1 Latar Belakang Kedatangan Imperialisme Belanda di Soppeng

Kedatangan bangsa Eropa (Belanda) di Sulawesi Selatan pada umumnya menjalani dua periode, yakni sebagai berikut :

###### 1. Periode Tahun 1601 - 1811

Ketika Spanyol melarang para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisbari menyebabkan Belanda mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang dagangan terutama rempah-rempah yang diangkut oleh Portugis dari Indonesia. Tindakan Spanyol itu mendorong bangsa Belanda untuk mencari rempah-rempah ke Timur, pada tanggal 22 juni 1596 dengan armada Belanda yang pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman.

Antara mereka sesama bangsa Eropa timbul persaingan perdagangan. Atas inisiatif Van Oldenbernevel semua usaha pedagang Belanda disatukan dalam suatu kongsi dagang, maka "pada tanggal 20 April 1602 berdirilah kongsi dagang Belanda yang disebut Vereenigde Dost Indische Compagnie atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur yang di singkat VOC. Serikat dagang itu antara lain bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia" (Abduh, 1985/1986 : 74).

Untuk mencapai usaha monopoli perdagangan tersebut, Belanda berusaha menguasai bandar-bandar perdagangan yang ada di kawasan Indonesia. Dengan kekuatan senjata yang mereka miliki maka mereka tidak segan sama sekali dalam melakukan tindak kekerasan, dan akhirnya pada abad ke-17, "Belanda berhasil menduduki pangkalan di Ambon, Ternate, Halmahera, dan Tidore" (Muktar, 1988 : 43).

Dengan demikian, setelah Belanda menduduki dan menguasai pangkalan-pangkalan tersebut, maka Belanda mengalihkan perhatiannya ke Bandar Somboupu. Menurut anggapan Belanda bahwa Somboupu sangat penting karena letaknya yang strategis. "Berkat letaknya dipusat lalu lintas ke timur. ke arah laut Banda, ke barat menuju laut Jawa. ke Selatan ke laut Flores dan ke Utara dengan Selat Makassar" (Muktar, 1988 : 44).

Dalam rangka penguasaan Bandar Somboupu yang strategis ini, maka Belanda berusaha mengadakan hubungan dagang dengan Raja Gowa. Dalam tahun 1601 barulah mereka berhasil mulai mengadakan hubungan dengan Raja Gowa (Abdul Razak. 1983;21). Raja Gowa pada waktu itu ialah Sultan Alauddin, belum dapat menentukan sikap mengenai hubungan dagang yang ditawarkan oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1607, laksamana Belanda yang bernama Cornelis Matelief

mengirim seorang saudara bangsa Belanda yang bernama Abraham Matyaz ke Somboupu untuk mengadakan hubungan perdagangan, tetapi ditolak oleh Sultan Alauddin. Keinginan Belanda untuk bekerja sama dengan Gowa belum berhasil.

Usaha Belanda untuk mengadakan kontak dengan Gowa telah mengarah kepada aksi kekerasan, sehingga menimbulkan reaksi dalam bentuk perlawanan rakyat di daerah ini. Dengan demikian, Belanda berusaha untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja Gowa, antara lain sebagai berikut;

a. Raja Gowa XIV yaitu Sultan Alauddin (1593-1639)

Dalam tahun 1615, Belanda mengulangi lagi usahanya untuk mengadakan kontak dengan Gowa. Kapal dagang Belanda yakni Enkhuyzen berlabuh di Bandar Somboupu, seorang utusan naik ke darat yang bernama Abraham Sterck tidak mendapatkan perlakuan yang layak dari masyarakat setempat yakni orang Makassar. Utusan kembali ke kapal dan melaporkan kejadian itu kepada Kapten kapal, yang bernama De Vries. Pihak Belanda kemudian mengadakan tipu muslihat, yaitu dengan mengundang bangsawan Gowa untuk beramah tamah di atas kapal. Akan tetapi tanpa di duga bahwa setelah bangsawan-bangsawan Gowa berada di atas kapal lalu mereka dilucuti senjatanya oleh Belanda, pada saat itu juga terjadilah perkelahian yang hebat di atas kapal.

Tidak lama kemudian datang lagi seorang utusan Belanda menghadap kepada Sultan Alauddin supaya dapat melarang orang-orang Makassar berdagang di daerah Maluku dan Banda. Gowa yang menganut politik kebebasan berdagang di laut lepas, maka larangan Belanda itu terus ditolak oleh Sultan Alauddin dengan ucapan

"Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan bumi dan lautan. Bumi telah dibagi-bagikan diantara manusia, tetapi lautan diberikan untuk umum: tidak pernah kami mendengar, bahwa pelayaran dilautan dilarang bagi seseorang. Jika Belanda melakukan larangan, maka itu berarti, bahwa Belanda seolah-olah mengambil nasi dari mulut orang lain" (Abdul Razak, 1983 : 22)

Meskipun hal itu sudah ditolak oleh Sultan Alauddin, namun Belanda tetap mendesak dengan berbagai cara yang dilakukan, demi tercapainya monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur.

Pada tahun 1627, Armada Gowa bersama kerajaan-kerajaan yang lain, seperti kerajaan Ternate. Kerja sama untuk membangun serangan terhadap kapal-kapal VOC yang berada di perairan Maluku, serangan ini menyadarkan Belanda bahwa politik perdagangan dalam bentuk monopoli terancam. Serangan terhadap setiap kapal VOC yang di jumpai di laut berlangsung hingga tahun 1630. Pada tahun 1632, Anthonio Coen datang dari Batavia ke Gowa tetapi maksud Belanda itu masih gagal.

Antara tahun 1634-1636, armada Gowa menghantam kapal perang VOC di Maluku. Oleh karena Belanda khawatir menghadapi kemusnahan, maka Gubernur Jendral



Belanda Antonio Van Diemen minta berdamai, sehingga pada tanggal 26 juni 1637 Belanda menerima syarat-syarat perdamaian.

b. Raja Gowa XV yaitu Sultan Malikussaid (1639-1653)

Syarat-syarat perdamaian yang telah diterima baik oleh Belanda dari perjanjian perdamaian pada tanggal 26 juni 1637, dengan sendiri Belanda tidak mentaati dan mengindahkan isi perjanjian perdamaian itu.

Adapun isi perjanjian perdamaian pada tanggal 26 juni 1637, yakni isi ringkasnya adalah "Perdamaian kekal, perdamaian bebas, akan tetapi Belanda tidak boleh mendirikan tempat tinggal permanen di Somboupu" (Abdul Razak, 1983 : 25). Dengan sikap angkuh Belanda, sehingga isi perjanjian perdamaian itu tidak di taati dan diindahkan lagi serta kecurangan Belanda pada tahun 1639 dengan merampas sebuah perahu yang penuh muatan kayu di perairan pulau Timor, sehingga menyebabkan timbulnya pertempuran diantara kedua belah pihak.

Dalam pertempuran antara belanda dengan Gowa ini menimbulkan persaingan yang berat di antara keduanya untuk memperebutkan pusat-pusat perdagangan.

c. Raja Gowa XVI yaitu Sultan Hasanuddin (1653-1669)

Persaingan antara belanda dengan Gowa untuk memperebutkan pusat-pusat perdagangan bahwa kawasan-kawasan yang menjadi penghasil rempah-rempah yang



sangat penting artinya bagi Belanda, akhirnya berkembang jadi suatu konflik militer terbuka antara armada Belanda dengan armada kerajaan Gowa.

Pada tahun 1655, pertempuran terjadi dengan sengit antara Belanda dengan armada kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perang ini merupakan usaha penentu bagi armada Belanda untuk berhasil tidaknya dalam usaha monopoli perdagangan di daerah Gowa. Pada tahun 1660, terjadi lagi pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan kerajaan Gowa, karena "Ekspedisi Belanda yang terdiri dari 31 buah kapal sebanyak 2.600 awak kapal yang dikirim ke Sulawesi Selatan. Serangan ini berhasil menduduki benteng Panakukkang pada tanggal 12 juni 1660" (Pawiloy, 1987 : 36)

Peperangan laut antara kedua ini berkembang terus menerus dari tahun ke tahun. Dan akhirnya dalam pertempuran laut yang menentukan itu, dimana pasukan Belanda di pimpin oleh Laksamana Speelman yang mendapat bantuan dari Arung Palakka dan Letenri Bali Datu Soppeng serta pasukan Ambon, akhirnya kerajaan Gowa harus mengakui keunggulan pasukan Belanda.

Pada tanggal 16 november 1667, tercapailah suatu perjanjian perdamaian antara Belanda dengan Gowa di tempat yang bernama Bungaya dekat Barombong. Perjanjian

mana terkenal di Gowa dengan sebutan "Cappaya ri Bungaya" (perjanjian di Bungaya), dan orang Belanda menamakannya "Het Bongaisch Verdag".

Cappaya ri Bungaya itu, sangat mencekik kerajaan Gowa, akan tetapi tak dapat dielakkan oleh keadaan yang semakin memburuk. Adapun ringkasan-ringkasan dari perjanjian itu, antara lain sebagai berikut;

1. Makassar akan membayar semua kerugian yang diderita oleh kapal-kapal Belanda yang kandas dan semua pelaku-pelakunya harus dihukum didepan resident dari VOC.
2. Compagnie akan mendapat monopoli perdagangan.
3. Orang-orang Inggris dan Portugis dilarang berdagang di Makassar.
4. Orang-orang Inggris yang barang-barangnya berada di Makassar harus diserahkan kepada Belanda.
5. Compagnie akan dibebaskan dari cukai dan pajak-pajak pelabuhan.
6. Uang VOC akan berlaku di Makassar.
7. Semua benteng dan istana harus dihancurkan kecuali dua. Satu untuk Belanda (Benteng Ujung Pandang) dan satu untuk Sultan Hasanuddin (Benteng Somba Opu).
8. VOC juga akan menerima ganti kerugian uang sebesar 250.000 ringgit.
9. Ditambah dengan denda terdiri atas 1.000 orang budak laki-laki dan perempuan yang muda, sehat dan dewasa atau uang sejumlah harga dari budak-budak itu.
10. Raja akan kehilangan semua hak-haknya atas Sumbawa, Buton dan semua negeri disekitar Celebes, dimana raja mengaku mempunyai kekuasaan. (Mattulada, 1990 : 88)

Kembali Belanda mempergunakan kelicikannya. Perjanjian perdamaian Bongaya amat merugikan Gowa. Karena itu, tidak sedikit orang Gowa pergi merantau serta membantu musuh kompeni (Belanda). Karaeng

Karunrung dan Karaeng Galesong tidak mau menghadiri penandatanganan perjanjian. Bahkan kedua panglima tangguh itu mempelopori kewaspadaan pasukan Gowa dan benteng Somba Opu. Pada tanggal 12 April 1668, pasukan Gowa keluar dari benteng Somba Opu, menuju Fort Rotterdam, yakni benteng Ujung Pandang yang telah dikuasai Belanda. Panji-panji perang dikibarkan pertanda peperangan dimulai kembali. Pertempuran berkobar, dan banyak jatuh korban.

Sultan Hasanuddin sesungguhnya tidak setuju pada isi perjanjian Bongaya. Ia memberikan dukungan moril setiap perlawanan para panglimanya, sambil mengirim utusan ke Batavia menyampaikan protes. Karena Batavia tetap bertahan, maka pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin menyerahkan diri, turun tahta. Ia konsekwen terhadap janji yang pernah diucapkan "Lebih suka hancur lebur dari pada dijajah orang asing" (Pawiloy, 1987 : 38). Puteranya, Sultan Amir Hamzah yang masih muda, menggantikan menjadi raja Gowa. Pada tanggal 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin wafat.

Meskipun Sultan Hasanuddin telah wafat, perjuangan untuk mengusir Belanda tetap berlanjut. Perlawanan diteruskan oleh Karaeng Bantolangkasa, seorang bangsawan tinggi Gowa-Tallo. Karena sesuatu hal, ia merantau ke Sumbawa, dan kawin dengan putera

Sultan di sana. Dalam tahun 1726 Karaeng Bontolangkasa kembali ke Gowa guna meneruskan perlawanan terhadap Belanda. Sesampainya di Gowa, ia melakukan persekutuan dengan Aru Kaju dari Bone, dan La Maddukelleng Aru Sengkang. Bersama sekutunya, Bantaeng di serang dan mengusir Belanda dari situ (1734). Dalam tahun 1736, bersama Aru Kaju mengusir Belanda dari Maros dan Pangkajene. Daerah tersebut sempat di kuasai Karaeng Bonto langkasa selama dua tahun.

Dalam bulan April 1739, bersama dengan La Maddukkelleng dari Wajo, menyerang Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam). Tiga bulan kemudian, Belanda melakukan serangan balasan ke Somba Opu. Pasukan Karaeng Bontolangkasa bertahan mati-matian. Pada tanggal 17 Juli 1739. Ibu kota Gowa berada kembali di bawah pengawasan Belanda. Karaeng Bontolangkasa yang tidak mau melihat Belanda berkuasa di Gowa, mundur kepedalaman. Pada tanggal 8 September 1739, beliau wafat. Sedangkan La Maddukelleng bersama pasukannya kembali ke Wajo.

Perjuangan menentang kekuasaan asing di Wajo mencapai puncaknya ketika La Maddukelleng naik tahta aebagai Arung Matowa Wajo pada tanggal 6 November 1736. Ia tidak hanya menyerang Belanda di Wajo saja, melainkan pula sampai ke Gowa. Sekembalinya dari Gowa.



La Maddukkelleng tetap melanjutkan perlawanan. Dalam bulan Desember 1740, pasukan Wajo disiapsiagakan. Belanda ketika itu memulai serangan balasan dan telah sampai di Cenrana. Meskipun pasukan Belanda diperlengkapi 42 pucuk meriam, tentara Wajo mampu menahannya hingga perbatasan Wajo dan Bone. Setelah La Maddukkelleng meletakkan jabatan. Perlawanan terhadap Belanda agak mereda sampai tahun 1811 sewaktu kekuasaan Belanda di Makassar di gantikan oleh kekuasaan Inggris.

## 2. Periode Tahun 1818

Pada tahun 1816, Belanda mengambil alih kembali kekuasaan dari Inggris, Serah terima berlangsung di Makassar dalam bulan Oktober 1818. Berhubung dengan terjadinya pertukaran pemerintahan dari Belanda kepada Inggris dari tahun 1812 sampai tahun 1816, maka pada waktu pemerintahan Belanda menerima kembali dari Inggris pemerintahan, pemerintah belanda harus menghadapi suatu pekerjaan yang maha berat untuk mengembalikan kekuasaan dan pengaruhnya yang sebenarnya telah hilang semasa pemerintahan Inggris. Kebanyakan raja-raja menganggap dirinya tidak lagi terikat pada perjanjian Bungaya. Untuk itu, diadakanlah perjanjian pembaharuan pada tanggal 9 Agustus 1824 atas perjanjian Bungaya tahun 1667/1669.

Dalam tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Cappelen datang ke Makassar karena khawatir terhadap

perlawanan akan berkobar, maka raja-raja di Sulawesi Selatan diundang guna diajak untuk bekerja sama. Raja-raja yang menghadiri dan menandatangani Perjanjian Ujung Pandang adalah Raja Gowa, Bangka, Binamu, Laikang, Sanrabone, Sidenreng, Tanete dan Buton. (Abdul Rajak, 1983,94) sedangkan raja-raja yang tidak hadir adalah raja Bone, Luwu, Wajo, Soppeng, Suppa dan Mandar. (Pawiloy, 1987:40).

Adapun ringkasan-ringkasan dari perjanjian pembaharuan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Perdamaian dan persahabatan antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan raja-raja yang masuk dalam perjanjian ini.
2. Gubernur Hindia Belanda diakui sebagai pembela dan pelindung dari persekutuan dan raja Gowa dan Bone dianggap selaku anggota-anggota tertua dari persekutuan.
3. Anggota-anggota sekutu memandang musuh-musuh dari Gubernemen sebagai musuh-musuhnya dan sahabat-sahabat Gubernemen sebagai sahabat-sahabatnya.
4. Raja-raja tidak akan berperang satu sama lain.
5. Memajukan pertanian.
6. Gubernemen boleh mendirikan benteng-benteng di mana saja dia suka.
7. Kepada raja-raja dilarang mengadakan surat-menyurat dengan negara-negara asing dan menerima duta-duta asing, jika tidak seizin Gubernemen.
8. Mata uang yang berlaku ialah mata uang Belanda.
9. Gubernemen akan memberikan bantuan kepada raja-raja yang terikat pada perjanjian ini, di mana dianggap perlu.
10. Raja Bone kehilangan haknya selaku anggota sekutu yang tertua, jika dia di dalam tempo dua bulan sesudahnya perjanjian ini ditutup, tidak masuk dalam perjanjian ini. (Abdul Razak, 1983 : 94-95).



Penolakan sebagian raja di Sulawesi Selatan terhadap perjanjian tersebut menyebabkan Belanda segera melancarkan serangan terhadap beberapa Kerajaan yang tidak mau tunduk kepada Belanda, namun bagi Kerajaan Soppeng pada abad-19 belum pernah sama sekali diserang lebih-lebih dikuasainya. Hal ini dimungkinkan karena Bone merupakan induk pertahanan afdeling masih kuat.

Pada awal abad ke-20, Belanda dengan giat memperluas wilayah kekuasaannya di Indonesia dalam rangka menciptakan "Pax Neerlandica" yaitu suatu kawasan damai di bawah naungan kerajaan Nederland. Peperangan yang dilakukan untuk menciptakan suatu kedamaian dan keamanan dinamakan "Perang Pasifikasi" dengan maksud untuk menciptakan suatu situasi yang aman di Indonesia.

Tercapainya situasi yang aman di Indonesia adalah situasi yang sangat didambakan oleh Belanda pada waktu itu, karena untuk memperlancar penanaman modal asing di daerah luar Pulau Jawa. Usaha Belanda dalam memperluas daerah kekuasaannya di luar Pulau Jawa. Khususnya di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20, memang telah lama disadari oleh Kerajaan-kerajaan di daerah Indonesia bagian timur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Belanda mengirim ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan pada tahun 1905, ekspedisi ini

bertujuan untuk menaklukkan semua kerajaan di Sulawesi Selatan dalam rangka "Perang Pasifikasi" (Abdul Razak, 1981/1982 : 107).

Yang menjadi sasaran ekspedisi militer ini adalah kerajaan Bone, perhitungan Belanda pada waktu itu ialah, bahwa bilamana Bone yang paling kuat dari kerajaan-kerajaan lainnya sudah ditaklukkan maka dengan mudah saja Kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan lainnya diserang dan ditundukkan.

Berbagai paksaan yang tidak dapat diterima dijalankan oleh Belanda sebagai alasan untuk mengadakan serangan terhadap Kerajaan Bone, antara lain ialah tuntutan Belanda kepada Kerajaan Bone supaya menyerahkan kepadanya pelabuhan-pelabuhan BajoE dan Pallima bersama hak-hak pungutan bea cukai atasnya. Selanjutnya pemerintah Belanda menuntut, supaya kerajaan Bone dikuasai langsung oleh Gubernur, akan tetapi Arumpone bersama Dewan Pemerintahnya (Arung PituE) menolak dengan tegas (Abdul Razak, dkk, 1989 : 274). Pada tanggal 20 Juli 1905, pertempuran dimulai antara pasukan kerajaan Bone dengan pasukan Belanda, karena kekuatan pasukan kerajaan Bone tidak seimbang dengan kekuatan pasukan musuh, maka Raja Bone bersama dengan pengikut-pengikutnya meninggalkan ibukota kerajaan. Pasukan Bone dipimpin oleh Panglima Besar Kerajaan Bone yang bernama Abdul Hamid Petta Punggawa Bone.

Setelah pertahanan Bone dalam setiap peperangan selalu terdesak oleh lawan, maka Raja beserta pengikut-pengikutnya meninggalkan Kerajaan Bone, mula-mula ke Citta di daerah Soppeng, kemudian ke daerah Wajo dan akhirnya ke Gunung Awo Tanah Toraja. Melalui mata-mata yang disebarluaskan oleh Belanda, sehingga pada akhirnya Belanda mengetahui tempat-tempat persembunyian Raja Bone, kemudian tempat-tempat persembunyian itu "diserang oleh Belanda pada tanggal 18 Nopember 1905". (Pawiloy, 1987:46).

Pertempuran sengit pun terjadi karena tentara Bone bertekad bertahan tidak mau mundur lagi membela kehormatan Rajanya dan Kerajaan Bone. Akan tetapi Panglima Abdul Hamid Petta Ponggawae gugur, sehingga secara praktis semangat perlawanan dari kelasykaran Bone menurun, sehingga pada akhirnya Belanda mematahkan perlawanan rakyat. Raja Bone "La Pawawoi Karaeng Sigeri" jatuh ketangan tentara Belanda kemudian Baginda dibawa oleh Belanda ke Jawa dan di asingkan di kota Bandung. (Abdul Razak, 1983 : 112)

Setelah Belanda berhasil mengalahkan Bone barulah dihadapinya kerajaan Gowa. Untuk mengepung Kerajaan Gowa, Belandapun tidak ketinggalan mengatur strateginya. Dia mendirikan dan memperkuat benteng-benteng antara lain : Benteng di Balangnipa (Sinjai),



benteng di Camba (Maros) dan benteng di Pangkajene (Pangkep). Dari sanalah Belanda mengerahkan pasukan-pasukannya ke daerah-daerah yang dianggap strategis, seperti Pare-pare, Wajo dan Soppeng. (Abdul Razak, 1983 : 112)

Belanda mengerahkan pasukan-pasukannya ke daerah tersebut dengan maksud untuk melemahkan atau mematahkan semangat raja-raja dan rakyat di sana yang oleh Belanda sangat dikawatirkan akan membantu selanjutnya Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone melawan Belanda.

Setelah jatuhnya Bone di tangan Belanda pada tahun 1905 Belanda mencoba meluaskan ekspansinya ke Kerajaan Soppeng dengan mencoba melakukan pendekatan-pendekatan kepada Datu Soppeng dimana Kerajaan Soppeng pada waktu itu di bawah pemerintahan Datu Soppeng yang ke-35 yang bernama Sitti Zaenab Arung lapadjung.

Kedatangan Imperialisme Belanda di Soppeng seperti yang ditulis oleh Abdul Razak Daeng Patunru (1976 : 12):

"pada tanggal 25 September 1905, Panglima dari ekspedisi ke Sulawesi Selatan yang bernama Van Leonen tiba di Watansoppeng pada tanggal 28 September 1905 Panglima tersebut mengadakan rapat di Istana Datu Soppeng yang dihadiri oleh Datu Soppeng Sitti Zaenab Arung Lapadjung bersama beberapa pembesar Kerajaan dan raja-raja bawahannya.

Rapat yang diadakan oleh Van Leonen di Istana Datu Soppeng tersebut, berakhir dengan hasil yang memuaskan bagi Belanda yaitu penandatanganan pernyataan

pendek oleh Datu Soppeng "Sitti Zaenab Arung Lapadjung" bersama-sama pembesar-pembesar Kerajaan Soppeng yang hadir saat itu.

Adapun ringkasan pernyataan pendek itu, adalah sebagai berikut :

1. Raja-raja mengakui daerahnya sebagai bagian dari Hindia Belanda.
2. Raja-raja berjanji tidak akan berhubungan dengan sesuatu pemerintahan lain.
3. Raja-raja mengaku tunduk kepada pemerintahan Belanda.

Namun demikian, terdapat juga perbedaan keinginan pemerintah Belanda dengan keinginan rakyat untuk menolak hasil rapat yang memungkinkan timbulnya perselisihan dan pertempuran yang bersifat memaksakan penguasa dan rakyat setempat. Hal tersebut dapat dilihat dalam bukunya Panarangi Hamid (1991 : 213) sebagai berikut :

"Peristiwa penaklukan daerah Soppeng, sekaligus menjadi pertanda bagi penduduk setempat, bahwa mereka secara keseluruhan telah menjadi orang-orang jajahan dari pihak Imperialisme Belanda. Sejak saat itu terjadi pulalah guncangan-guncangan dibidang politik maupun pemerintahan. Seberapa jauh perkembangan politik dan pemerintahan ketika itu di daerah Soppeng tidaklah diketahui secara pasti, namun berbagai sumber mengungkapkan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang kurang atau sama sekali tidak sudi bekerjasama dengan pihak Belanda, antara lain Watang LipuE dan Arung Bila yang bernama La Pute Ici".

### 3.2 Praktek Imperialisme Belanda di Soppeng

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa setelah Kerajaan Bone takluk dari setiap perlawanan, sehingga pimpinan Kerajaan Bone dan pembesar kerajaan dapat mengungsi ke daerah-daerah sekitarnya, maka Belanda mengalihkan perhatiannya ke daerah-daerah tersebut, termasuk daerah Kerajaan Soppeng yaitu tempat persembunyian pimpinan Kerajaan Bone yaitu Citta.

Yang menjadi Datu di Kerajaan Soppeng pada masa itu adalah Datu Sitti Zaenab Arung Lapadjung, pada tahun 1895 - 1940, yaitu pelaksanaan kepemimpinan bersama dengan beberapa kerajaan dan raja-raja bawahannya.

Pada tanggal 28 September 1905 terjadi penandatanganan pernyataan pendek (Korte Verklaring) dengan hasil yang sangat memuaskan bagi pemerintah Belanda, akan tetapi pada masa penguasaan Belanda ini kondisi pemerintahan Kerajaan Soppeng masih seperti sediakala, yakni tampuk pimpinan kerajaan masih tetap dipegang oleh Datu Soppeng Sitti Zaenab, sedangkan dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Soppeng maka Baginda Datu dibantu oleh para Pabbicara, Pa'danreng, Sullewatang dan Walang LipuE. (Hamid, 1991 : 213)

Pada waktu itu Soppeng terdiri dari wanua Lale'bata yang semenjak dahulu kala merupakan inti Kerajaan Soppeng. Disanalah bertempat kedudukan Datu Soppeng bersama pembesar-pembesar kerajaannya dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun Kerajaan kecil yang disebut lili

(vasal), semuanya itu mempunyai otonomi yang sangat luas dan mempunyai susunan pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya keadaan beberapa distrik di Onder Afdeling Soppeng, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai distrik itu, sebagai berikut :

1. Distrik Lale'bata, distrik ini sejak dahulu merupakan inti dari Kerajaan Soppeng yang dikuasai langsung oleh Datu Soppeng dengan dibantu oleh tiga orang Pabbicara. Distrik ini dibagi dalam tiga buah distrik bawahan :
  - a. Lale'bata Alau (Lalebata Timur)
  - b. Lale'bata Tengnga (Lalebata Tengah)
  - c. Lale'bata Riadja (Lalebata Barat)
2. Distrik Lilirila, distrik ini adalah penggabungan dari beberapa lili, diantaranya :
  - a. Lompengen Riadja Salo (sebelah barat sungai)
  - b. Lompengen Rilau Salo (sebelah timur sungai)
  - c. Matjanre
  - d. Baringeng
3. Distrik Lili-Riadja, distrik ini adalah penggabungan lili, diantaranya :
  - a. Galung
  - b. Ganra
  - c. Lumpulle
  - d. Bakke Appanang
  - e. Djampu
  - f. Lili di sebelah barat sungai WalanaE
4. Distrik Pattodjo, distrik ini dahulu merupakan lili-lili dalam peperangan diantara Kompeni Belanda dan Arung Palakka disatu pihak dengan Raja Gowa Sultan Hasanuddin dilain pihak, yaitu :
  - a. Pattodjo
  - b. Betawi
  - c. Latjokkong
5. Distrik Tjitta, terbagi dalam buah distrik bawahan, yaitu:
  - a. Tjitta-Manorang (Citta bagian utara)
  - b. Tjitta-Maniang (Citta bagian selatan)
6. Distrik Mario-Riawa, yang terbagi dalam empat buah distrik bawahan, yakni:
  - a. Awang Salo
  - b. BuluE
  - c. Attang Salo
  - d. Panintjong
7. Distrik Mario-Riwawo, yang terbagi dalam tiga buah distrik bawahan, yakni:
  - a. Mario-Rilau (Mario bagian timur)
  - b. Mario-Ritengnga (Mario bagian tengah)
  - c. Mario-Riadja (Mario bagian barat)

(Abdul Razak, 1976;15-16)

Pembagian daerah Soppeng kedalam beberapa distrik yang disebutkan diatas, dijalankan dengan kuat oleh pemerintah militer Belanda untuk melakukan pengawasan politik oleh yang berkuasa disamping itu akan lebih memudahkannya pelaksanaan suatu dominasi politik, ekonomi dan sosial.

Dalam bidang politik, dimana kekuasaan pemerintah berada ditangan kaum penjajah yang dapat memerintah dengan sekehendak hatinya, penguasa-penguasa pribumi makin kecil pengaruhnya dan semakin tergantung pada kekuasaan Belanda. Kebebasan dalam menentukan kebijakan pemerintah (Datu) semakin berkurang, secara langsung Belanda mencampuri urusan pribumi, misalnya dalam menentukan jalannya pemerintahan kerajaan.

Didalam bidang ekonomi, dimana sistem perekonomian disusun sedemikian rupa sehingga segala keperluan penduduk tanah jajahan tergantung pada perusahaan-perusahaan sipenjajah sendiri. Seluruh kegiatan perekonomian berada di bawah pengawasan penjajah Belanda dan disesuaikan dengan politik perekonomian kolonial. Sistem perekonomian kolonial ini berintikan pemerasan yang didasarkan atas paham, bahwa kita bangsa Indonesia tidak mempunyai kesanggupan dan kecakapan untuk melaksanakan produksi dan distribusi dalam mengurus dirinya sendiri.



Dalam waktu itu, penjajah Belanda kurang memperhatikan terhadap kesanggupan pendidikan pribumi, karena pendidikan pribumi itu hanyalah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan penjajah, terutama akan tenaga-tenaga murahan baik tenaga administratif maupun tenaga rendahan. Oleh karena itu pendidikan yang dilaksanakan oleh penjajah Belanda bukan untuk meningkatkan kecerdasan pribumi, tetapi hanya untuk kepentingan penjajahannya.

Kebijakan pendidikan kolonial semacam pemenuhan akan kebutuhan tenaga-tenaga rendahan saja, sesungguhnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya golongan intelektual yang sangat membahayakan penjajah Belanda. Kurangnya perhatian terhadap pendidikan pribumi juga dilandasi anggapan bahwa masyarakat siterjajah memang mempunyai kualitas yang rendah tidak dapat menerima pendidikan yang tinggi, seperti kualitas manusia sipenjajah.

Dalam bidang sosial, dimana penjajahan Belanda kurang sekali mengadakan hubungan baik dengan penduduk pribumi. Akibatnya terdapat kesenjangan antara sipenjajah dengan siterjajah, karena alasan perbedaan kualitas, warna kulit dan kemampuan ekonomi.

Situasi dan kondisi masyarakat daerah jajahan itu membawa akibat terjadinya penderitaan rakyat dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan bermasyarakat sehingga pada gilirannya muncul perlawanan rakyat sebagai reaksi terhadap praktek-praktek penjajahan Belanda melalui perjuangan rakyat daerah.



Disamping itu pemerintah Belanda berusaha mendekati kelompok bangsawan, sehingga pemerintah Belanda dapat menggunakan para bangsawan dalam kegiatan pemerintah dengan maksud agar dapat menggunakan pengaruh mereka untuk membendung hasrat masyarakat yang tampil menyatakan penolakan dan perlawanan mereka terhadap pemerintah Belanda.

Usaha pemerintah Hindia Belanda lebih menampakkan maksud untuk memecah belah kelompok bangsawan dan berusaha menciptakan jarak antara rakyat dan bangsawan mereka. Tindakan pemerintah Belanda ini dipandang akan dapat menimbulkan pemikiran di kalangan rakyat, sehingga dapat membendung keinginan rakyat dalam menentang pemerintah Belanda. Usaha untuk membendung keinginan rakyat, melalui asumsi pemerintah Belanda, sebagai berikut:

1. Bila mereka melakukan perlawanan pada pihak pemerintah Belanda berarti mereka menjerumuskan bangsawan ke dalam tawanan perang dan diasingkan.
2. Rakyat akan merasa bahwa yang berkuasa adalah penguasa mereka sendiri sehingga segala ketidakadilan dan ketidakpastian yang nampak dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan tindakan dari penguasa bumiputera sendiri.
3. Rakyat merasa bahwa mereka kehilangan ujung tombak perjuangan yang akan mampu mengorganisasi mereka dan mendukung mereka dalam melancarkan gerakan perlawanan. (Kadir, dkk, 1984 : 95)

Dengan demikian, suatu bukti nyata bahwa Belanda berusaha membendung semaksimal mungkin sikap perlawanan rakyat melalui pengaruh kekuasaan dari raja-raja setempat.

Usaha pemerintah Belanda untuk membendung munculnya perlawanan rakyat, hanya dapat menelorkan bentuk perlawanan baru dari masyarakat yang bercorak keagamaan dengan kecenderungan yang bersifat gerakan mesianistis, militeristis ataupun nativistis.

## BAB IV

### PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP IMPERIALISME BELANDA

#### 4.1 Latar Belakang Perlawanan Rakyat

Sesungguhnya jauh sebelum ekspedisi militer Belanda tahun 1905, telah terjadi perlawanan rakyat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, seperti perlawanan Kerajaan Suppa, Tanete, Bone dan Gowa serta kerajaan-kerajaan yang lain. Perlawanan rakyat yang dilakukan oleh beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan merupakan upaya untuk menolak dan menentang kehadiran pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh para raja-raja yang berkuasa pada setiap kerajaan merupakan dasar perlawanan rakyat selanjutnya.

Rakyat Sulawesi Selatan, sejak jaman raja-raja terkenal anti penjajahan. Semangat juang ini tidak pernah padam, sekalipun selalu terdesak oleh lawan bahkan dikalahkan oleh lawan samasekali tetapi mereka tetap berusaha menghidupkan semangat perjuangan rakyat melawan Imperialisme dan Kolonialisme Belanda.

Selanjutnya, sejak awal abad ke-20 kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan mengadakan perlawanan terhadap perang pasifikasi yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal J. B. Van Heutz (1904 - 1909). Kerajaan-kerajaan yang pertama mengadakan perlawanan dalam Perang Pasifikasi adalah sebagai berikut :

"Perlawanan Kerajaan Bone, Gowa, Lima Ajattapareng, Massenrempulu, Luwu, Mandar dan lain-lain. Perlawanan terhadap Belanda dipelopori oleh Bone sejak tahun 1905 dan berakhir tahun 1907, sehingga praktis sejak tahun 1907 seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, dapat dikuasai Belanda, meskipun demikian itu perlawanan tidak berhenti sama sekali, karena sampai tahun 1917 dan seterusnya masih terjadi perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh golongan rakyat biasa" (Abduh, 1981/1982 : 94).

Perlawanan rakyat biasa mempunyai semangat yang menimbulkan mereka anti penjajahan karena mereka mencintai kebebasan tanah airnya. Kemudian dari pada itu semangatnya kiranya diperkuat oleh tradisi yang disebut siri'na yaitu rasa malu yang amat mendalam, yang menyebabkan lahirnya tanggungjawab untuk menghapuskannya, kalau perlu dengan mempertaruhkan nyawa. Hal ini diikuti oleh perasaan solidaritas (setia kawan) yang mengakibatkan rasa haru yang mendalam pula.

Latar belakang siri' ini yang terpaut dalam perasaan keagamaan masyarakat Soppeng, sehingga pada saat Belanda melaksanakan penjajahannya di Indonesia, rakyat Soppeng bangkit melakukan perlawanan rakyat semesta, tidak memandang harta, tenaga bahkan nyawa di korbankan demi untuk membela kehormatan harga dirinya.

Oleh karena itu usaha Belanda dalam menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Soppeng pada awal abad ke-20, tidak dapat dilepaskan dengan kebijaksanaan politik pemerintahan Hindia Belanda, pada akhir abad ke-19, dalam penciptaan suatu kawasan damai di bawah naungan kerajaan Nederland.



Untuk maksud tersebut bagi Belanda, maka mendorong nafsu Imperialisme Belanda melakukan ekspansi-ekspansi di kerajaan-kerajaan Nusantara, baik yang masih merdeka maupun yang sudah terikat pada Belanda. Perang perluasan wilayah ini disebutnya Perang Pasifikasi yaitu peperangan yang dilakukan untuk menciptakan kedamaian dan keamanan dengan tujuan, sebagai berikut :

- "a. Menciptakan keamanan untuk menjamin berhasilnya penanaman modal swasta Belanda dan modal swasta asing lainnya di Indonesia.
- b. Menguasai tanah yang potensial untuk usaha pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal swasta di Indonesia.
- c. Mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya di kerajaan-kerajaan diluar Jawa" (Abduh, 1981/1982 : 93).

Usaha Belanda dalam melaksanakan Perang Pasifikasi itu, adalah memperluas daerah kekuasaannya di luar pulau Jawa, yakni sasaran utamanya adalah di Indonesia Timur. Usaha Belanda dalam memperluas kekuasaannya di luar pulau Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20, memang telah lama disadari oleh kerajaan-kerajaan di daerah ini. Untuk kerajaan seperti Bone, Gowa, Suppa, Tanete, Ajattapareng, Massenrengpulu dan kerajaan lainnya ikutmenentang usaha Belanda, sehingga pada abad ke-20 di Sulawesi Selatan terjadi peperangan yang menyeluruh dalam melawan Imperialisme Belanda.

Tujuan pokok yang sebenarnya dari Belanda adalah untuk menguasai langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan

dan Tenggara. Yang menjadi sasaran ekspedisi militer Belanda dalam usaha memperluas kekuasaannya di Sulawesi Selatan adalah Kerajaan Bone, karena dianggapnya Kerajaan Bone sebagai pelopor dari kerajaan lainnya dalam menentang kekuasaan asing, seperti perhitungan sebagai berikut :

"Perhitungan Belanda pada waktu itu adalah bahwa bilamana Bone yang paling kuat daripada kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan sudah dapat ditundukkan maka dengan mudah Kerajaan Gowa dan kerajaan lainnya diserang dan ditundukkan" (Abdul Razak 1983 : 110).

Perhitungan Belanda seperti tersebut di atas, adalah nampaknya tepat karena mengingat diantara raja-raja di Sulawesi Selatan. Dia cukup berpengaruh untuk mengajak raja-raja lainnya melakukan perlawanan terhadap Belanda (Poesponegoro dan Nugroho 1992 : 209).

Peperangan yang terbilang hebat, dan meluas keseluruh pelosok Sulawesi Selatan, ialah yang terjadi dari tahun 1905 sampai dengan tahun 1907. Pertempuran melawan Belanda pada awal abad ke-20 masih dilakukan secara terpisah. Karena Bone masih cukup luas, maka pasukan Belanda mula-mula memusatkan serangannya ke BajoE. Dalam waktu singkat, Watampone dikuasai sehingga La Pawawoi hijrah ke pedalaman. (Pawiloy, 1987 : 7).

Setelah tentara Belanda dalam bulan Juli 1905 menyerang Bone dan menduduki ibukotanya, yaitu Watampone maka raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama puteranya yakni Abdul Hamid Petta PunggawaE Bone (Kepala Angkatan

Perang Kerajaan Bone) dan berbagai anak bangsawan Bone terpaksa mengungsi yakni meninggalkan daerah Kerajaan Bone. mula-mula ke Citta Soppeng, kemudian ke daerah Wajo akhirnya ke gunung Awo Tanah Toraja. Akan tetapi melalui mata-mata yang disebarluaskan oleh Belanda, sehingga akhirnya Belanda mengetahui tempat-tempat persembunyian Raja Bone, kemudian daerah-daerah itu diserang oleh Belanda pada tanggal 18 Nopember 1905. Pada tahun 1905 Panglima Belanda yang bernama Van Loenen tiba di Watansoppeng yakni Ibukota Kerajaan Soppeng.

Pada tanggal 28 September 1905 Panglima Belanda itu mengadakan rapat di Istana Datu Soppeng yang dihadiri oleh Datu Soppeng yang bernama Sitti Zaenab Arung Lapadjung, bersama-sama beberapa pembesar kerajaan serta raja bawahan di Kerajaan Soppeng.

Rapat yang dilangsungkan di Istana Datu Soppeng itu, berakhir dengan hasil yang memuaskan bagi pihak Belanda, yaitu dengan penandatanganan pernyataan pendek oleh Datu Soppeng dan beberapa pembesar Kerajaan Soppeng. Adapun ringkasan dari pernyataan pendek itu, adalah sebagai berikut :

1. Raja-raja mengakui daerahnya sebagai bagian dari Hindia Belanda.
2. Raja-raja berjanji tidak akan berhubungan dengan sesuatu pemerintah lain.
3. Raja-raja mengaku tunduk kepada Pemerintah Belanda.

Pernyataan pendek tersebut oleh sebagian besar pembesar Kerajaan Soppeng menilai bahwa tuntutan Belanda adalah tidak adil, karena hanya dapat merugikan rakyat Soppeng. Disamping itu, wakil Datu Soppeng dan beberapa pembesar kerajaan menilai bahwa kedatangan Belanda di Soppeng selaku penguasa asing akan merusak nilai-nilai luhur kerajaan, seperti tradisi kebiasaan, adat istiadat, tata pergaulan dalam masyarakat agama/kepercayaan yang telah terpelihara dengan baik di Kerajaan Soppeng. Kemudian dari pada itu akan merusak kehidupan kerajaan karena dapat menguasai kehidupan ekonomi demi kepentingan Belanda, sehingga pada akhirnya timbul penderitaan rakyat berupa kemelaratan, kemiskinan dan keresahan masyarakat.

Dengan demikian, maka pembesar-pembesar kerajaan Soppeng yang tidak menghadiri rapat merupakan golongan penentang bagi keputusan dalam pernyataan pendek itu, setelah datangnya ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Van Loenen (komando tentara ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan).

Sementara Baso Balusu dalam jabatannya sebagai wakil Datu Soppeng, sejak beberapa waktu lamanya telah membentuk pasukan bersenjata di wilayah kerajaan Soppeng bagian barat (Balusu, daerah Soppeng Riaja kabupaten Barru sekarang) dan sekitarnya.

Semangat rakyat menentang Belanda, dapat dilihat pernyataan Abdul Razak (1976;13), bahwa;



"Seorang tentara Belanda yang bernama Kapten Kooy mendesak kepada Datu Soppeng sitti Zaenab Arung Lapadjung agar supaya baginda Datu berusaha dengan sungguh-sungguh memberi peringatan seluruh rakyat yang mendukungnya, agar supaya mereka membatalkan maksud perlawanannya terhadap pemerintah Belanda, Datu Soppeng berusaha dengan sungguh-sungguh memperingati itu, akan tetapi usaha itu sia-sia adanya."

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesetiaan rakyat di Soppeng terhadap bangsa dan negara sangat tinggi, karena terbukti bersedia melawan ekspedisi militer Belanda, walaupun banyak resikonya bagi dirinya dan keluarganya.

#### 4.2 Proses Perlawanan Rakyat

Proses perjuangan rakyat menentang Imperialisme Belanda di Soppeng antara tahun 1905-1942, dapat dibagi dalam lima tahap, yaitu:

##### 4.2.1 Perlawanan Rakyat di Soppeng dipimpin oleh Watang LipuE La Palloge (1905-1906)

Telah dikemukakan terdahulu, bahwa ketika Bone takluk kepada Belanda, maka Belanda mengalihkan perhatiannya ke Kerajaan Soppeng. Pada tanggal 25 September 1905, Panglima ekspedisi ke Sulawesi Selatan yang bernama Van Loenen tiba di Watansoppeng dan pada tanggal 28 September 1905. Panglima Belanda tersebut mengadakan rapat di Istana Datu Soppeng yang dihadiri oleh Datu Soppeng yang bernama Sitti Zaenab Arung Lapadjung bersama beberapa pembesar kerajaan serta raja-raja bawahannya. Adapun yang tidak menghadiri rapat adalah Sulle Datu Soppeng yang bernama Andi Muhammad Baso Balusu (Wakil Datu Soppeng) Watang LipuE La Palloge (Panglima Angkatan Perang Kerajaan Soppeng). La Mappe



(Datu Marioriawa) dan beberapa raja bawahan yang tidak hadir, mereka ini merupakan golongan penentang Belanda.

Dimasa pemerintahan Sitti Zaenab Arung Lapadjung, Imperialisme Belanda mulai menguasai Kerajaan Soppeng, setelah Belanda berhasil memaksakan penandatanganan pernyataan pendek. Pasukan Belanda mulai menginjakkan kakinya di Watansoppeng dibawah pimpinan Kapten Kooy pada waktu itu. Kedatangan Belanda di Soppeng pada tahun 1905 ini, pada mulanya tidak mendapat perlawanan dari Datu Soppeng sendirim, sebab beliau beranggapan bahwa dengan melakukan perlawanan atas pendudukan Belanda itu, yang memiliki persenjataan yang lengkap akan membawa kesensaraan bagi rakyat Soppeng sendiri.

Atas pertimbangan itu, maka Datu Soppeng dan rakyatnya tidak melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda, akan tetapi Datu Soppeng secara diam-diam menugaskan kepada Panglima perang Soppeng yakni Watang LipuE Palloge, untuk bergabung dengan Arung Sering untuk membentuk kelasykaran (Sofyaningsih, 1989:60).

Watang LipuE Lapalloge dalam jabatannya sebagai Kepala Angkatan Perang Kerajaan Soppeng merupakan salah seorang pembesar kerajaan yang tidak sempat menghadiri rapat yang diadakan oleh Panglima ekspedisi militer Belanda yang bernama Van Loenen. Sedangkan bagi mereka yang tidak menghadiri rapat itu merupakan golongan

(Datu Marioriawa) dan beberapa raja bawahan yang tidak hadir, mereka ini merupakan golongan penentang Belanda.

Dimasa pemerintahan Sitti Zaenab Arung Lapadjung, Imperialisme Belanda mulai menguasai Kerajaan Soppeng, setelah Belanda berhasil memaksakan penandatanganan pernyataan pendek. Pasukan Belanda mulai menginjakkan kakinya di Watansoppeng dibawah pimpinan Kapten Kooy pada waktu itu. Kedatangan Belanda di Soppeng pada tahun 1905 ini, pada mulanya tidak mendapat perlawanan dari Datu Soppeng sendirim, sebab beliau beranggapan bahwa dengan melakukan perlawanan atas pendudukan Belanda itu, yang memiliki persenjataan yang lengkap akan membawa kesensaraan bagi rakyat Soppeng sendiri.

Atas pertimbangan itu, maka Datu Soppeng dan rakyatnya tidak melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda, akan tetapi Datu Soppeng secara diam-diam menugaskan kepada Panglima perang Soppeng yakni Watang LipuE Palloge, untuk bergabung dengan Arung Sering untuk membentuk kelasykaran (Sofyaningsih, 1989:60).

Watang LipuE Lapalloge dalam jabatannya sebagai Kepala Angkatan Perang Kerajaan Soppeng merupakan salah seorang pembesar kerajaan yang tidak sempat menghadiri rapat yang diadakan oleh Panglima ekspedisi militer Belanda yang bernama Van Loenen. Sedangkan bagi mereka yang tidak menghadiri rapat itu merupakan golongan

penentang Belanda secara terang-terangan. Dan inilah kemudian yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di Soppeng, atas dasar perintah Datu secara rahasia harus wajib militer.

Kemudian daripada itu, Kapten Kooy sendiri selalu mendesak kepada Datu Soppeng, supaya membatalkan maksud perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda dan mereka itu harus segera datang menyerah kepada pimpinan tentara Belanda. Panglima perang Kerajaan Soppeng beserta rakyat Soppeng tidak mengindahkannya dan tidak bersedia untuk datang menyerah kepada Belanda.

Dengan demikian, olehnya itu tentara Belanda mulailah mengadakan operasi di daerah-daerah terpencil untuk menangkap pemimpin-pemimpin rakyat serta rakyatnya pada permulaan bulan Oktober 1905. Operasi Belanda itu di pimpin oleh Kapten Kooy. Pada tanggal 10 Nopember 1905 terjadi pertempuran di Sering (sebelah barat Ta'juncu) antara pasukan Kapten Kooy dengan pasukan Soppeng. Dari pihak Soppeng gugur 32 Orang dan senapan dirampas oleh tentara Belanda sebanyak 20 pucuk (Abdul Razak, 1976:13).

Tanggal 10 Nopember 1905 merupakan hari perlawanan rakyat Soppeng yang pertama, karena pada saat itu terjadi pertempuran sengit secara langsung antara pasukan Soppeng melawan pasukan Belanda, sekalipun pasukan Soppeng malah terdesak oleh lawan yang lengkap persenjataannya. Pada

tanggal 10 Desember 1905 Kapten Kooy memperoleh kabar yang dapat dipercaya, bahwa panglima perang Kerajaan Soppeng yaitu Watang LipuE La Palloge, Datu Marioriawa yaitu La Mappedan dan La Tjeppaga Daeng Beta (saudara dari Pabbicara Barru "La Bombai Daeng Ma'gading"), telah ada bersembunyi di Palakka di atas bukit umpungan di bagian sebelah timur Soppeng (Abdul Razak, 1976 : 13). Di dalam pertengahan bulan Desember 1905 bantuan pasukan-pasukan Kapten Kooy berangkat ke Watansoppeng, melalui Pare-Pare, Massepe dan Batu-Batu. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1905, Panglima perang Kerajaan Soppeng yakni Watang LipuE La Palloge dan Datu Marioriawa yakni La Mappedan, menyerah kepada penguasa sipil dan militer Belanda di Rappang. Walaupun demikian perlawanan rakyat dilaksanakan seterusnya.

Selanjutnya, pada tahun 1906 pemerintah kolonial Belanda lebih aktif menyerang daerah-daerah bawahan lainnya di Kerajaan Soppeng, setelah Belanda mengetahui bahwa rakyat di berbagai daerah bawahan Kerajaan Soppeng semakin banyak menentang pemerintah kolonial Belanda.

Menurut sumber Lontara' Soppeng yang telah diterjemahkan dan disalin oleh Mahmud Husein (1977 : 4), dinyatakan yakni setelah Belanda mengetahui hasrat rakyat Sering, maka Belanda menyusun serdadunya untuk menyerang daerah itu dan kampung Lawo sebagai basis perlawanan atau tempat pertahanannya, di sana juga Belanda menyusun pasukan kelasykaran yang ada...

Akan tetapi, sebaliknya pada akhir Juni 1906 terjadi serangan mendadak dari pasukan kelasykaran Sering atau pasukan La Palloge di tempat basis pertahanan Belanda, serangan yang dipimpin oleh La Banna sebagai penguluh musuh pasukan I MacepaE. Pertempuran yang sengit terjadi selama setengah jam dimana pasukan Belanda terpuak mundur samapi di Kambang SubuE (dekat kota Watansoppeng).

Pada tanggal 5 Juli 1906 Belanda melakukan serangan balasan ke daerah pertahanan La Palloge di gunung MacepaE. Setelah Belanda berada di Salalong di sebelah barat Kampung Lawo, terjadi pertempuran yang sengit yang kedua kalinya di sungai Salalong (Husein, 1977:5). Dipihak pasukan Kelasykaran Sering, pertempuran melawan Belanda di sungai Salalong ini dipimpin oleh La Pajampu (penguluh musuh Gunung MacepaE), pada akhirnya Belanda mundur sampai di Kampung Lawo.

Setelah berselang selama 5 hari, maka pada tanggal 10 Juli 1906, Belanda menyusun kembali pasukannya kemudian Belanda mengetahui tempat pertahanan pasukan La Palloge di atas Gunung Donri-Donri.

Pada sumber yang sama, dijelaskan proses pertempuran selanjutnya antara pasukan Kelasykaran Sering dengan pasukan Belanda, sebagai berikut:

"Pada tanggal 9 Agustus 1906 terjadi lagi pertempuran yang ketiga kalinya, yang mana pasukan Belanda berangkat meninggalkan Kampung Lawo menuju ke tempat pertahanan La Palloge dengan melalui Kampung Pising



ditemani oleh Jennang Mangiri dari Madello dengan tujuan untuk menggempur pasukan La Palloge, maka pada pagi hari jam 08.00 pertempuran ini berlangsung selama satu jam, dimana pasukan Watan Lipu dipimpin oleh Andi Boto dan Andi Talebbe, termasuk pula penguluh musuh pasukan (Husein, 1977:7).

Dalam pertempuran tersebut, Andi Boto dan Andi Talebbe masing-masing penguluh musuh Pasukan I dan II telah tewas, maka Gunung Macepae yaitu Markas besar pasukan Watang Lipu La Palloge. Karena serangan yang bertubi-tubi sehingga markas inipun berpindah tempat yaitu di Kae, suatu tempat disebelah parat Gunung Macepae, dua hari setelah pertempuran yang keempat kalinya di atas Gunung Kae yang dipimpin oleh La Palloge, pertempuran ini berlangsung selama satu jam dan akhirnya pasukan La Palloge terpukul mundur sehingga banyak yang lari masuk dalam hutan-hutan untuk bergerilya.

Pada tanggal 4 September 1906 Watang Lipu La Palloge menerima surat dari Belanda untuk diajak turun dan kepadanya diberikan kebebasan bersenjata. Berdasarkan isi surat pemerintah kolonial Belanda tertanggal 1 September 1906, yakni berusaha membujuk panglima perang kerajaan agar senantiasa dapat berunding dengan pihak pemerintah kolonial Belanda (Husein, 1977:7). Dan setelah La Palloge mempertimbangkan serta meras menang baginya, maka ia turun dari gunung bersama dengan bawahannya dan sebagian diantaranya tinggal di dalam hutan, mereka ini tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Namun demikian itu, La

Palloge turun dari gunung bukanlah merasa menyerah kepada Belanda, melainkan karena beliau berpendapat bahwa cita-citanya dapat tercapai dengan jalan berunding, akan tetapi atas kecurangan politik pemerintah kolonial Belanda, kesempatan inilah digunakan oleh Belanda untuk menangkap beliau, sehingga La Palloge tidak dapat mencapai cita-citanya sebagaimana yang diharapkan.

Kehadiran La Palloge dalam memimpin pasukan laskar perang Watang Lipu adalah realita sejarah yang dianggap sebagai awal bagi suatu perjuangan yang mempertahankan daerahnya yang cukup lama, sesuatu yang penting dalam sejarah lokal daerah Kerajaan Soppeng dan tidak mungkin akan terulang kembali.

Melalui pernyataan yang luhur ini tak dapat disanksikan lagi, dan tak dapat diragukan bahwa keterlibatan pasukan Watang Lipu dan rakyat Soppeng dalam perang melawan Belanda adalah penciptaan mempertahankan harga diri, siri dan ditopang oleh ajaran-ajaran Islam bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar dan merupakan perang suci bagi rakyat Soppeng, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW (Muhammad Fais Almati, 1991 :176) yang berbunyi :

"Berjihadlah melawan kaum musykin dengan harta, jiwa dan lidahmu" (H.R.Annasai), selanjutnya pada hadist Nabi berikutnya beliau berkata "Tiada setetes yang lebih disukai Allah, Azza Wajalla dari pada setetes darah dijalan Allah" H.R.Attabrani).

Palloge turun dari gunung bukanlah merasa menyerah kepada Belanda, melainkan karena beliau berpendapat bahwa cita-citanya dapat tercapai dengan jalan berunding, akan tetapi atas kecurangan politik pemerintah kolonial Belanda, kesempatan inilah digunakan oleh Belanda untuk menangkap beliau, sehingga La Palloge tidak dapat mencapai cita-citanya sebagaimana yang diharapkan.

Kehadiran La Palloge dalam memimpin pasukan laskar perang Watang Lipu adalah realita sejarah yang dianggap sebagai awal bagi suatu perjuangan yang mempertahankan daerahnya yang cukup lama, sesuatu yang penting dalam sejarah lokal daerah Kerajaan Soppeng dan tidak mungkin akan terulang kembali.

Melalui pernyataan yang luhur ini tak dapat disanksikan lagi, dan tak dapat diragukan bahwa keterlibatan pasukan Watang Lipu dan rakyat Soppeng dalam perang melawan Belanda adalah penciptaan mempertahankan harga diri, siri dan ditopang oleh ajaran-ajaran Islam bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar dan merupakan perang suci bagi rakyat Soppeng, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW (Muhammad Fais Almati, 1991 :176) yang berbunyi :

"Berjihadlah melawan kaum musykin dengan harta, jiwa dan lidahmu" (H.R.Annasai), selanjutnya pada hadist Nabi berikutnya beliau berkata "Tiada setetes yang lebih disukai Allah, Azza Wajalla dari pada setetes darah dijalan Allah" H.R.Attabrani).



Petunjuk-petunjuk ajaran Rasulullah di atas merupakan motivasi perjuangan laskar Watang LipuE mempertahankan Kerajaan Soppeng dari serangan Belanda.

#### 4.2.2 Perlawanan Rakyat di Soppeng dipimpin oleh Andi Muhammad Baso Balusu (November-Desember 1905)

Salah seorang pembesar Kerajaan Soppeng yang tidak sempat hadir dalam rapat yang diadakan pada tanggal 28 September 1905, adalah wakil Datu Soppeng (Sulle Datu) yang bernama Andi Muhammad Baso Balusu, gelarnya Andi Muhammad Saleh Daeng Perani.

Beliau termasuk golongan penentang pemerintah Belanda secara terang-terangan, sejak beberapa waktu lamanya beliau telah membentuk pasukan bersenjata yang disebut pasukan Balusu, khususnya untuk mengadakan perlawanan terhadap tentara Belanda.

Kerajaan Balusu merupakan kerajaan kecil yang berotonom dalam wilayah Kerajaan Soppeng selalu tampil membantu kerajaan induk dalam menentang Belanda, terutama setelah datangnya serangan Belanda pada Kerajaan Soppeng Alau (bagian timur) sehingga jatuh ke tangan Belanda dalam waktu beberapa hari saja.

Melihat suasana yang mencekam itu, maka Muhammad Saleh Daeng Perani bersama anggota laskarnya melakukan permufakatan dengan beberapa Kerajaan-kerajaan lili lainnya yang ada disekitarnya, seperti ; Siddo, Kiru-kiru

dan Ajakang guna menentukan sikap untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai pada titik darah penghabisan.

Sikap tersebut terbukti pada bulan Nopember 1905 pada saat pertempuran dalam menghadapi serangan Belanda pada saat pagi menjelang matahari berada di ufuk timur. "Pada tanggal 12 Nopember 1905 dan pada hari-hari berikutnya terjadi pertempuran dalam daerah cBalusu antara tentara Belanda dengan tentara Soppeng" (Abdul Razak, 1976;13). Dari pertempuran itu pihak Belanda memulainya dari pinggir laut antara daerah Takkalasi dengan bawa SaloE Soppeng bagian barat (kini wilayah Kabupateh Barru). Serangan yang dilancarkan Belanda ini dihadapi dengan tekad dan semangat yang membara oleh laskar Balusu bersama dengan sekutunya sesuai dengan kemampuannya. Mereka bertahan tanpa mengenal menyerah demi mempertahankan tumpah darahnya, bahkan mereka memilih lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berputih mata ataukah kehormatan diinjak-injak oleh bangsa lain (Rasyid. 1990;58).

Pada pertempuran itu, Sulle Datu Andi Muhammad Saleh Daeng Perani bersama laskarnya yang dibantu oleh laskar-laskar dari sekutunya yang mengamuk tiada henti-hentinya. Akhirnya pertempuran itu dapat dimenangkan oleh pasukan Balusu dengan laskarnya, setelah setapak demi setapak daerahnya yang telah diduduki oleh Belanda direbut



dengan meninggalkan mayat-mayat yang bergelimpangan. Sebagai akibat pertempuran dua hari dua malam itu adalah dari pihak Belanda beberapa orang tewas dan luka-luka, sedangkan pada pihak Kerajaan Soppeng gugur 100 orang dan 150 orang yang luka-luka (Abdul Razak, 1976;13).

Semua pasukan pendudukan Belanda yang datang menyerang dapat dimusnahkan, kecuali yang dapat lolos ke induk pasukannya yang menjaga kapal, sebanyak 10 orang serdadu.

Menurut ceritera rakyat yang dikemukakan oleh Darwis Rasyid (1990;58) sebagai berikut :

"Akibat dari pertempuran tersebut menyebabkan banyaknya jatuh korban antara kedua belah pihak, maka rakyatpun selam dua hari menanam mayat. Sedangkan mayat-mayat dari serdadu Belanda yang tidak sempat ditanam lagi, maka dibuang saja ke sungai Lampoko, menyebabkan airnya berwarna merah".

Diceritakan pula, bahwa dalam permufakatan sebelum terjadinya serangan Belanda yang kedua, maka salah satu diantaranya yaitu seorang Raja yang merupakan sekutu Balusu diketahui akan ingkar dalam permufakatan. Yakni akan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah kepada Belanda, namun niatnya itu tidak dapat terlaksana karena pada waktu itu, isteri Sulle Datu yang bernama "Icening Emma Nandi" tiba-tiba berdiri dengan sikap bagaikan singa betina yang siap menrkam mangsanya, menyatakan dengan lantang dalam bahasa Bugis, yaitu "De Uwangkei mau sidoi-doi maneng tau BalusuE rekko Wede naewai pute mataE

atau Belanda" (Rasyid, 1990;59). Artinya saya tidak mau ramah tamah kepada semua orang Balusu kalau tidak mau melawan terhadap orang putih mata (Belanda).

Isteri Sulle Datu Soppeng, Icenning Emma Nandi, akan bersikap memimpin laskar melawan Belanda jika seandainya suaminya tidak sanggup memegang pucuk pimpinan pasukan Balusu. Dengan kemauan dan dorongan yang menyala-nyala dari isterinya, Sulle DatuE mengumpulkan para pemimpin laskar Balusu dan sekutunya untuk membicarakan langkah-langkah guna menghadapi serangan Belanda yang diperkirakan akan terulang (Rasyid, 1990 : 59).

Berselang satu bulan kemudian, yaitu 10 Desember 1905 Belanda melakukan kembali serangan kedalam wilayah Kerajaan Balusu dengan jumlah dan peralatan yang lebih besar baik melalui laut maupun lewat daratan. Pada waktu itu tanggal 10 Desember 1905 Kapten Kooy juga memperoleh kabar yang dapat dipercaya, bahwa Sulle Datu Andi Muhammad Saleh Daeng Perani ada bersembunyi di Palakka di atas bukit Umpungan Bagian Timur Soppeng (Abdul Razak, 1976 : 14). Walaupun kapten Kooy mengetahui tempat persembunyian Sulle Datu, akan tetapi serangan pasukan Belanda dilancarkan terus dan disambut dengan gegap gempita penuh semangat oleh laskar-laskar Balusu beserta sekutunya.

Namun demikian, tidak seberapa lama perang berlangsung tiba-tiba pasukan laskar kerajaan dari sekutu Balusu beserta rajanya membawa bendera putih sebagai tanda menyerah kepada pihak Belanda. Kekalahan dan

penyerangan pasukan Balusu Soppeng ini disebabkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai Datu Soppeng yang bernama Jennang Mangiri, yakni menunjukkan arah jalan kepada pihak Belanda yang datang membantu melalui daratan dari jurusan Timur pertahanan pasukan Balusu (Rasyid, 1990:59).

Akibat pertempuran yang kedua ini menyebabkan Sulle DatuE bersama laskarnya terpaksa mundur dan gudang mesiu Kerajaan Balusu di Larokko, dibakar oleh pihak musuh karena itu ditinggalkan. Raja Balusu Andi Muhammad Saleh Daeng Perani bersama pengikut-pengikutnya yang tidak mau menyerah kepada pihak Belanda, melakukan perang gerilya, namun pada akhirnya para pengikut-pengikutnya makin lama makin berkurang dan berangsur-angsur pula menyerah kepada pihak Belanda. Sebagai akibat dari pertempuran-pertempuran di kerajaan kecil Balusu ini, banyak korban kedua belah pihak.

Pada tahun 1910 Raja Balusu, Andi Mumammad Baso Balusu sebagai Sulle DatuE Soppeng yang merupakan Raja yang terakhir dari Kerajaan Balusu wafat. Pada masa-masa selanjutnya pihak pemerintah Belanda mengambil alih Kerajaan Balusu dan mengatur sendiri sistem pemerintahannya. Datu Balusu telah tiada, namun sejarah kepahlawanannya dalam mempertahankan daerahnya tetap dikenang oleh generasi Kerajaan Balusu.

#### 4.2.3 Pergerakan Mistik di Soppeng Dipimpin oleh Daeng Pabarang (1907)

Kekalahan yang dihadapi oleh pihak pemerintah bumiputera serta kemenangan yang diperoleh pihak pemerintah Hindia Belanda, ternyata tidak mampu memadamkan semangat perjuangan rakyat atas kehadiran Belanda.

Pergerakan rakyat bermunculan, seperti pergerakan Mistik. Pada dasarnya pergerakan-pergerakan itu tidak terorganisir dengan baik sehingga oleh pemerintah Hindia Belanda hanya dipandang sebagai gangguan keamanan dan tindakan perampokan belaka (Kadir dkk, 1984 : 91).

Daeng Pabarang alias Petta Barang misalnya, seorang tokoh yang sebelumnya dipandang sebagai seorang yang selalu mengganggu keamanan, ternyata kemudian terbukti bahwa Daeng Pabarang adalah seorang pemimpin gerakan perlawanan rakyat dalam melawan pemerintah Hindia Belanda. Abdul Razak (1976 : 18), menyatakan bahwa :

"Pada tahun 1908 timbul sebuah pergerakan rakyat yaitu gerakan Mistik yang menggemparkan perlawanan rakyat Soppeng dan sekitarnya. Yang menjadi pawang gerakan itu adalah seorang yang bernama Daeng Pabarang (Petta Barang). Beliau sendirimenamakan dirinya sebagai Pamadeng Rukka yaitu putera dari Raja Bone yaitu Besse Kajuara."

Gerakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Daeng Pabarang itu dimulai di Kerajaan Bone terjadi setelah Kerajaan Bone diduduki dan dikuasai pasukan ekspedisi militer Belanda. Kegiatan Daeng Pabarang

di Passempe dalam mengorganisasi kekuatan untuk melakukan penyerangan terhadap kedudukan pemerintah Hindia Belanda itu tidak diketahui dan disadari oleh pemerintah militer sipil di Bone. Hal itu di sebabkan karena cara yang digunakan adalah melalui praktek pendukunan, sistem pengobatan tradisional. Disamping itu juga perhatian dari pasukan ekspedisi militer diarahkan pada usaha untuk memaksakan kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sulawesi Selatan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda melalui penampilan diri sebagai messias dan pemberian jimat kekebalan kepada pengikutnya. Ia berhasil memperoleh pengikut yang banyak yakin akan kekebalan dirinya berkat jimat itu sehingga membangkitkan keberanian dan semangat perjuangan.

Setelah segala persiapan perlawanan dirampungkan, ia mengorganisasikan sekelompok pengikutnya untuk melancarkan serangan. Pada bulan Juli 1906 berangkatlah satu kelompok pengikutnya yang bersenjatakan tombak dan keris (badik) menuju kota watampone. Sasaran penyerangan adalah bivak (perkemahan darurat militer) pasukan ekspedisi militer. Ketika menjelang dinihari, pengikut-pengikut Daeng Pabarang itu melancarkan serangan. Serangan yang tidak terduga itu membuat anggota pasukan militer Belanda itu tidak berhasil mengorganisasikan kekuatan untuk membinasakan penyerang. Kegagalan itu juga disebabkan



taktik serangan yang digunakan. Para penyerang setelah melancarkan serangan dengan segera meninggalkan tempat itu (Mukhlis dkk, 1989 :79).

Disamping melakukan penyerangan di wilayah Kerajaan Bone, Daeng Pabarang juga mengorganisasikan perlawanan di wilayah kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang terjangkau pengaruhnya. Di Tanete, ketika pasukan Belanda menyerang sekelompok penentang pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Daeng Patompo pada tanggal 26 Juli 1907, pada waktu itu Daeng Patompo gugur, diperoleh berita bahwa Daeng Pabarang selalu berada di daerah itu. Oleh karena itu pada akhir bulan itu diusahakan untuk menyerangnya. Pada waktu penyerangan itu Daeng Pabarang dapat meloloskan diri berkat bantuan dari pengikutnya yang terdekat. Selama Daeng Pabarang berada di Tanete, ia berada dibawah perlindungan dari La Tenri Sessu Datu Bakke.

Hingga pada akhir tahun 1907, Daeng Pabarang pimpinan gerakan penyerangan pasukan Militer Belanda, belum juga berhasil ditawan atau dibinasakan oleh pasukan Militer Belanda. Setiap usaha penyerangan terhadap tokoh itu selalu gagal, Daeng Pabarang senantiasa dapat meloloskan diri dari pasukan penyerang pemerintah Hindia Belanda. Keberhasilan Daeng Pabarang meloloskan diri dari setiap usaha penyerangan itu semakin menimbulkan ketenarannya dalam kalangan pengikut dan penduduk. Timbul anggapan bahwa tokoh itu dapat menghilang apabila hendak ditangkap. Juga sering ia berganti wajah, sebentar kelihatan bagaikan



seorang yang sudah tua dan kadang-kadang tampak seorang pemuda yang gagah dan tampan. Hal-hal itu disatu pihak mengandung kekaguman yang merangsang orang untuk berguru dan menjadi pengikutnya dan dipihak lain membuat kegelisahan dan ketakutan penduduk semakin bertambah (Mukhlis dkk. 1989 : 84).

Pada awal Pebruari 1908, para pengikut Daeng Pabarang melancarkan serangan terhadap bival Patiro Ballu. Serangan yang dilancarkan dengan jumlah anggota yang cukup banyak bersenjatakan tombak dan keris itu berhasil dibinasakan oleh pasukan militer Belanda yang telah dipersiapkan itu. Pengikut-pengikut Daeng Pabarang yang melancarkan serangan itu sesungguhnya tidak mengetahui adanya pasukan bantuan yang telah dipersiapkan untuk mematahkan serangan mereka. Itulah sebabnya serangan balasan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda itu berhasil membinasakan sekelompok penyerang yang berusaha lari meninggalkan medan penyerangan. Pihak kelompok Daeng Pabarang gugur 39 orang dan yang luka-luka tidak diketahui. Selain itu beberapa anggota penyerang berhasil ditawan. Rakyat yang membantu membinasakan kelompok penyerang dan diserahkan kepada pasukan militer Belanda.

Nampaknya kerugian yang diderita oleh Daeng Pabarang dalam penyerangan Bivak Patiro Ballu itu mempunyai dampak terhadap kesetiaan para pengikutnya. Tidak lama setelah peristiwa itu, Karaeng Bado bodu, salah seorang pemimpin

Bivak Patiro Ballu menyerahkan diri kepada pasukan militer pemerintah Belanda. Karaeng Bado Bodu selanjutnya diajukan kepengadilan Negeri dan dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa dalam tahanan. Disamping itu, karena telah terjalin kerjasama yang baik antara pemimpin-pemimpin rakyat dan penduduk disatu pihak dan pasukan militer Belanda dipihak lain dalam usaha pengejaran Daeng Pabarang dan kerugian yang diderita pihak Daeng Pabarang akibat pengejaran itu maka paman, istri dan saudara perempuan Daeng Pabarang menyerahkan diri kepada pemerintah Hindia Belanda. Hal itu berakibat kedudukan kepemimpinannya dalam mengorganisasikan penyerangan semakin merosot, dalam kalangan pengikut-pengikutnya berkembang pemikiran yang meragukan kedudukan Daeng Pabarang sebagai tokoh Lagendaris yang memiliki kesaktian, memberikan jimat yang ampuh, seorang messias yang diturunkan untuk memimpin rakyat membebaskan kerajaan dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Karena itu lambat laun pengikut-pengikutnya semakin berkurang, juga dukungan dan bantuan-bantuan yang diperoleh semakin berkurang.

Hambatan dan kerugian yang diderita Daeng Pabarang itu ternyata tidak memudarkan perjuangannya. Ia berusaha meneruskan perjuangannya dengan menjalin hubungan dengan Andi Panambong. Andi Panambong adalah seorang pemimpin bandit yang sangat terkenal di Soppeng. Andi Panambong

mengorganisasikan empat kelompok perampok di daerah Soppeng. Kerja sama yang dibina itu memberikan keuntungan bagi kegiatan mereka. Mereka berdua mendapat dukungan dan bantuan dari kebanyakan bangsawan di Soppeng dan Bone. (Mukhlis, dkk, 1989 : 86)

Gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Daeng Pabarang ini cukup menggelisahkan pemerintah Hindia Belanda setidak-tidaknya dapat membuat frustrasi dalam menghadapi gerakan rakyat sehingga dapat mengusir kolonialisme Belanda. Hal ini disebabkan adanya usaha yang besar dari pihak Daeng Pabarang untuk melancarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Disamping itu juga ada usaha dari bangsawan Soppeng yang terlibat dalam gerakan mistik ini telah terlihat beberapa orang terkemuka di Soppeng dan sekitarnya, diantaranya adalah "La Tenri Sessu Datu Bakke (putra Datu Tanete ; We Tenriolle). La Tomanggung Arung ubung dan La Matinro Arung Tung" (Abdul Razak, 1976:18).

Taktik penyerangan dari kelompok Daeng Pabarang ini nampak bercorak gerakan pengacauan. Taktik yang digunakan adalah setelah melancarkan penyerangan dengan segera meninggalkan lokasi yang menjadi sasaran penyerangan, diperdengarkan berita akan ada lagi penyerangan. Dengan cara itu mereka mengundang kecemasan penduduk dan mengundang pasukan militer untuk melaksanakan patroli. Melalui taktik ini nampaknya pihak Daeng Pabarang berusaha untuk mendapatkan kemungkinan yang menguntungkan bagi pelaksanaan gerakan perlawanannya.

Penduduk yang dicemaskan yang ditakutkan dengan berita penyerangan akan mengundang mereka berpikir bahwa kelompok perlawanan Daeng Pabarang termasuk kelompok yang kuat dan beranggotakan pemberani. Jika tidak demikian, mereka pasti tidak berani mengumumkan rencana penyerangan selanjutnya. Dengan demikian penduduk tidak akan berani menentang pengikut-pengikut Daeng Pabarang bahkan sebaliknya memberikan kemudahan dan fasilitas agar terhindar dari ancaman. Juga dapat mempengaruhi penduduk untuk ikut menjadi pengikut Daeng Pabarang.

Selanjutnya dengan rangsangan pemberian jimat yang dapat memberikan kepada pemakainya kekebalan diri dari senjata. Dapat dipastikan bahwa fasilitas pangan dan pemondokan yang diberikan oleh Daeng Pabarang kepada pengikut-pengikutnya yang memungkinkan semakin bertambahnya pengikut-pengikut Daeng Pabarang, fasilitas pangan dan pemondokan bagi pengikut Daeng Pabarang diperoleh dari bangsawan-bangsawan dan penguasa-penguasa yang mendukung dan membantu perjuangan Daeng Pabarang.

Maksud lain dari pemberitaan itu adalah mengundang pasukan militer mengadakan patroli. Pasukan patroli umumnya berjumlah kecil biasanya hanya satu regu. Jumlah yang kecil itu akan memungkinkan pengikut Daeng Pabarang yang hanya bersenjatakan tombak dan keris dapat berani dan berhasil menyerang. Serangan-serangan itu juga sekaligus



dapat merupakan demonstrasi keberanian dan kehebatan pengikut-pengikut Daeng Pabarang. Kegiatan Daeng Pabarang pada Tahun 1907 menunjukkan bahwa serangan-serangan banyak dilakukan terhadap pasukan patroli secara tiba-tiba kemudian segera lari meninggalkan tempat penyeberangan. Keberanian yang ditampilkan dan didemonstrasikan oleh pengikut-pengikut Daeng Pabarang pada gilirannya juga menggugah penduduk mengagumi pemimpin mereka.

Tergabungnya kelompok Daeng Pabarang dan Andi Panambong itu juga memberikan dorongan keberanian pengikut-pengikut Andi Panambong untuk melaksanakan perampokan secara terang-terangan. Kegiatan perampokan itu membawa dampak positif bagi pasukan militer Belanda. Karena dengan mudah dapat diketahui tempat persembunyian Daeng Pabarang dan Andi Panambong. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1912, pasukan Belanda melancarkan serangan terhadap tempat persembunyian Daeng Pabarang dan Andi Panambong di wilayah Kerajaan Soppeng. Dalam penyerangan itu Daeng Pabarang berhasil meloloskan diri namun Andi Panambong sendiri gugur bersama pengikut setianya (Mukhlis dkk, 1989:96).

Kematian Andi Panambong itu berakibat Daeng Pabarang kehilangan pegangan untuk mempertahankan dirinya. Ia selanjutnya mengungsikan diri ke hulu sungai salo Walamping. Di tempat persembunyian itu, sekali lagi diserang pasukan Belanda.

Dalam penyerangan itu ia berhasil juga meloloskan diri dari usaha penangkapan pasukan Belanda. Usaha-usaha yang terus menerus dilakukan pasukan Belanda itu untuk menangkap Daeng Pabarang selalu mengalami kegagalan.

Namun atas bantuan Datu Citta akhirnya Daeng Pabarang berhasil ditangkap pada tanggal 5 Mei 1913 di tempat persembunyiannya di Kampung Ala Cinto, setelah terlebih dahulu berusaha memisahkan Daeng Pabarang dari pengikut-pengikutnya. Pada tanggal 7 Juni 1913, Daeng Pabarang diberangkatkan ke Jawa sementara menanti keputusan tempat pengasingannya. Daeng Pabarang akhirnya menemui kematiannya sebagai seorang tawanan.

#### 4.2.4 Pergerakan Dupa di Soppeng dipimpin oleh La Duppa di Marioriwawo (1936)

Telah dikemukakan terdahulu, bahwa perlawanan dan pergerakan rakyat itu bukan hanya merupakan reaksi terhadap kehadiran Belanda sebagai kelompok luar yang dipandang akan mengancam kelembagaan dan peranata dalam masyarakat. Akan tetapi karena adanya sikap dan tindakan pemerintah Belanda pada waktu itu yang akan mendominasi kehidupan politik dan eksploitasi ekonomi.

Dengan demikian, maka periode pemerintahan Belanda adalah diwarnai dan dihiasi dengan perlawanan rakyat yang terkenal adalah Pergerakan Dupa di Marioriwawo Soppeng, pada tahun 1936 oleh seorang yang bernama La Duppa. Harun Kadir dkk, (1984:97) menyatakan bahwa :

"Gerakan Dupa yang terjadi pada bulan Juli 1936 di Marioriwawo Soppeng yang dipimpin oleh La Duppa pada dasarnya gerakan perlawanan rakyat yang ikut mewarnai dan menghiasi perlawanan rakyat dalam melawan pemerintahan Belanda, dalam periode pemerintahan Belanda itu (1905 - 1942)."

Pergerakan Dupa dalam menentang usaha dominasi politik dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh penjajahan Belanda, menunjukkan adanya usaha rakyat di distrik Marioriwawo Soppeng. Hal ini terbukti dari adanya usaha untuk mengancam ketentraman dan mengganggu keamanan yang ditujukan untuk dapat merugikan berbagai kebutuhan pemerintah Hindia Belanda, seperti melakukan perampokan Belanda, mengacau markas-markas basis Belanda, lalu kemudian cepat menghilang. Usaha pergerakan ini setidaknya tidaknya dapat membuatnya Belanda menjadi gelisah dan frustrasi.

Pada bulan Juli 1936. Pasukan gerakan Dupa ini, meningkatkan tindakan-tindakan gangguan-gangguan pertahanan Belanda dengan taktik perjuangan perang gerilya, dimana pada saat yang memungkinkan musuh diserang dikandang (markasnya) kemudian menghilang. Taktik ini dapat membawa kerugian bagi pihak Belanda, untuk itu Belanda mengerahkan kekuatannya guna menangkap pimpinan pergerakan Dupa yakni La Duppa. Peristiwa ini menyebabkan Belanda menyusun suatu pasukan untuk menyerang Marioriwawo, guna menangkap La Duppa, akan tetapi selalu mengalami kegagalan karena Belanda tidak mengetahui tempat-tempat menetap pasukan Dupa ini.

Berdasarkan ketentuan dari perjuangan rakyat dengan taktik perang gerilya, bahwa apabila musuh yang maju maka pasukan relatif akan mundur demi untuk mencari jalan keselamatan pasukan. Akan tetapi apabila musuh mundur, maka sekuat tenaga untuk maju menyerang demi untuk mencapai sasaran utama musuh.

Gerakan perlawanan yang dipimpin oleh La Duppa ini yang kemudian dikenal dengan gerakan Dupa, telah menggelisahkan pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan karena rakyat yang bergabung dalam gerakan Dupa ini secara terang-terangan menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Soppeng pada tahun 1936 sampai pada pendudukan Jepang di Indonesia.

Gerakan Dupa yang terjadi dalam wilayah distrik Marioriwawo yang terdiri dari distrik bawahan Marioritengah, Mariorilau dan Marioriaja, kesemuanya itu merupakan lokasi pusat pergerakan Dupa yang dipimpin oleh La Duppa. Pergerakan rakyat ini dapat menyadarkan bagi pemerintah kolonial Belanda, bahwa rakyat akan menentang terus-menerus keberadaan kolonialisme Belanda di Soppeng. Hal ini terbukti ketika Belanda hendak menindas perlawanan rakyat, akhirnya mendatangkan pasukannya dari luar daerah Kerajaan Soppeng.

Dalam usaha memelihara kelangsungan perjuangan dari gerakan perlawanan rakyat, maka terkadang para anggota pasukan menempuh taktik untuk menghadapi Belanda seperti yang dilakukan oleh para pejuang bangsa Indonesia pada

umumnya yaitu taktik dengan mengadakan serangan mendadak, musuh ditunggu pada tempat persembunyian dan bila mana musuh telah mendekat barulah diserang, inilah yang disebut taktik perang gerilya.

#### 4.2.5 Peristiwa Lajaroko

Dalam rangka melancarkan roda pemerintahan kolonialisme Belanda di Soppeng, maka Belanda membangun suatu proyek irigasi, bendungan dan saluran irigasi serta pembangunan jembatan Lajaroko yang sekarang dikenal oleh penduduk dengan nama Leccengen Cokie. Lajaroko adalah sebuah kampung dalam wilayah distrik Marioriawa Soppeng (kira-kira 35 km dari kota Watansoppeng).

Pembangunan proyek saluran irigasi dan jembatan ini, Belanda mengerahkan rakyat dalam bentuk kerja rodi (kerja wajib) tanpa memperhatikan kesehatan serta keselamatan kerja rakyat, karena bagi Belanda yang penting program pemerintah dapat jalan terus-menerus sampai selesai. Hal ini dapat menimbulkan penderitaan rakyat yang menyebabkan penduduk antipati terhadap Belanda.

Penderitaan dan penghinaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia pada jaman penjajahan bangsa asing adalah sebab utama meledaknya dan meluapnya semangat anti penjajahan dan anti penindasan didada rakyat Indonesia yang dalam perjuangannya hanya memilih mati atau merdeka (wawancara dengan Andi M. Palar Yusuf. 26 Maret 1997).



Hal tersebut di atas dialami oleh penduduk setempat dalam distrik Marioriawa dan sekitarnya, yakni dikerahkan untuk kerja rodi dalam pembangunan saluran irigasi dan pembangunan jembatan, di samping itu terkadang dihina dan semacamnya oleh Belanda. Kesemuanya itu dapat menimbulkan rakyat menjadi antipati dan membangkang kepada Belanda.

Setelah berjalan beberapa waktu lamanya, maka pada saat terjadi masa transisi dari pengalihan kekuasaan Belanda kepada kekuasaan pendudukan Jepang tahun 1842, telah diketemukan oleh penduduk setempat yaitu kawasan tentara Belanda yang masih berada dirumah atau tempat markas Belanda dihilu sungai Lजारoko, sehingga dengan informasi itu beberapa golongan militer distrik Marioriawa hendak mengepung tempat tersebut, akan tetapi nyatanya hanya empat orang kawanan tentara Belanda ditempat itu (basis sekitar jembatan Lजारoko).

Akibat ditemukannya 4 orang kawanan tentara Belanda itu, maka 2 diantaranya dibunuh oleh penduduk setempat dan 2 orang diantaranya dapat lolos dan melarikan diri dari kepungan penduduk setempat (Wawancara dengan Andi M. Palar Yusuf, 26 Maret 1997).

Peninggalan hasil pembangunan Imperialisme Belanda berupa jembatan, bendungan, saluran irigasi di Kecamatan Marioriawa sampai sekarang masih utuh, bahkan peninggalan itu masih digunakan dengan baik oleh penduduk setempat dalam mendukung usaha pertanian di daerah ini. Dan inilah merupakan keuntungan bagi daerah yang ditinggalkannya oleh

penjajahan Belanda.

Sementara peninggalan rumah Belanda yang dibangun pada tahun 1940-an dihilu sungai Lajaroko, setelah Belanda meninggalkan daerah tersebut, maka rumah peninggalan itu diangkut oleh penduduk setempat ke daerah pusat distrik Marioriawa, kini rumah itu sudah tidak ada lagi. Rumah peninggalan Belanda itu dipindahkan ke kota Batu-Batu, atas perintah Andi Galib (Anak dari Datu Soppeng yang ke-36, yaitu Haji Andi Wana).



## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam tulisan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

Rakyat di daerah Soppeng sangat menentang bentuk penjajahan di atas dunia karena penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Mereka mengorbankan harta, jiwa dan raganya demi untuk mempertahankan pemerintahannya dan penentuan nasib bangsa sendiri. Perlawanan rakyat di daerah Soppeng terhadap Imperialisme Belanda yang dimulai pada bulan November 1905 sampai dengan Januari 1942, adalah wujud nyata bahwa rakyat di daerah ini dapat menentang penjajahan Barat di Indonesia.

Perlawanan rakyat di daerah Soppeng terhadap penjajahan Belanda, mengakibatkan korban jiwa. Disisi lain, memperkuat dan mempertegas semangat patriotisme dan rasa nasionalisme dikalangan rakyat daerah, sebagai akibat hasil perlawanan rakyat terhadap Imperialisme Belanda antara tahun 1905 - 1942.

Dilain pihak bagi pemerintahan kolonial Belanda dapat menyadari bahwa perjuangan di daerah merupakan wujud kecintaan rakyat terhadap bangsa, negara dan pemerintahan bangsa sendiri. Pergerakan rakyat selama penjajahan

bukanlah suatu tindakan perampokan dan gangguan keamanan, akan tetapi pergerakan itu menunjukkan menolak dan menentang penguasaan dari penjajahan Barat di Indonesia utamanya di daerah Soppeng.

Peristiwa penting yang mendahului kehancuran kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia adalah peristiwa pecahnya perang di Asia Timur Raya yakni peristiwa pemboman yang dilakukan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941. Peristiwa ini dapat melibatkan seluruh daerah Asia Tenggara sehingga kawasan ini berada dalam keadaan perang besar. Keadaan dari peristiwa ini menunjukkan bahwa adanya cita-cita militer dari Jepang untuk menguasai seluruh Asia Tenggara dan Samudera Pasifik.

Peristiwa selanjutnya yakni terjadi pada tanggal 10 Januari 1942, ketika bala tentara Jepang membuka serangannya di kepulauan Indonesia guna menghancurkan kekuasaan Hindia Belanda, sehingga satu persatu kepulauan Indonesia dapat diduduki dalam waktu tiga bulan saja. Ketika itu Jepang berhasil menduduki seluruh kepulauan Indonesia, sehingga pada akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

Guna lebih memahami hakekat dan arti perjuangan rakyat di daerah Soppeng dalam melawan Imperialisme Belanda, sangat diharapkan kepada pembaca skripsi ini agar

mengkomparasikan dengan sumber-sumber sejarah perjuangan daerah lainnya di Sulawesi Selatan, sehingga menumbuhkan wawasan berpikir yang luas guna untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sangat diharapkan kepada para ilmuwan, termasuk para ilmuwan sejarah agar lebih meningkatkan penelitian penulisan sejarah terutama sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda di Soppeng yang akan dapat memperkaya bacaan sejarah Nasional Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1985. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Abdullah, Syukur, M. 1986, Penggalian Unsur-Unsur Kebudayaan Bugis-Makassar dalam Rangka Penegakan Disiplin Nasional dan Ketahanan Nasional. Ujung Pandang : Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1991, Biografi : Pahlawan Ranggong Daeng Romo. Panglima Lapris, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Abduh, Muhammad. 1985/1986. Sejarah Indonesia Madya. Proyek peningkatan Perguruan Tinggi (P3T). IKIP Ujung Pandang.
- \_\_\_\_\_. dkk. 1981/1982. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan. Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Ankersmith. F.R. 1987 Refleksi Tentang Sejarah. Jakarta : Gramedia.
- Abdul Razak Daeng Patunru. 1983. Sejarah Gowa. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- \_\_\_\_\_. 1976. Sejarah Ringkas Kerajaan Soppeng. Ujung Pandang. Bingkisan Budaya. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- \_\_\_\_\_. dkk. 1989. Sejarah Bone. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Baco. Salam. Drs. 1995, Soppeng dari Kerajaan Menjadi Kabupaten. Soppeng : Depdikbud Kabupaten Soppeng.
- Budiarjo, Meriam. 1982. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Fais Almati, Muhammad, Dr. 1991. Seribu Seratus Hadist Terpilih.

- Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Press.
- Hamid, Pananrangi. 1991. Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Husein, Mahmud. 1977. Sejarah Perjuangan Masyarakat Desa Donri-Donri Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Semasa Penjajahan Belanda Sampai Masa Kemerdekaan. Berkas Revolusi Pemerintahan Kecamatan Donri-Donri. Pising.
- Hugiono, 1987. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta : Bina Aksara.
- Kansil dan Julianto, 1988. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia Jakarta : Erlangga.
- Kadir, Harun dkk. 1984. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950). Kerjasama BAPPEDA Dati I Propinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin: Ujung Pandang.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1971. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : Djambatan.
- Mattulada, 1974. Elite di Sulawesi Selatan. Jakarta YPN No.2 tahun 1974.
- \_\_\_\_\_. 1995. La Toa. Suatu Lukisan Analisa Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- \_\_\_\_\_. 1990. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.
- Mukhtar. 1988. Perjuangan Rakyat Luwu dalam Menentang Imperialisme Belanda di Luwu Antara Tahun 1905 - 1942. Skripsi Sarjana FPIPS, IKIP Ujung Pandang.
- Mukhlis, dkk. 1989. Daeng Pabarang Messianisme dalam Gerakan Sosial di Pedalaman Bugis. Ujung Pandang : Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.

Notosusanto, Nugroho. 1971. Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah. Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.

Pawiloy, Sarita. 1987. Arus Revolusi di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang : Dewan Harian Daerah Angkatan 45.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid IV. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka.

Rasyid, Darwis. 1990. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Tingkat II Barru. Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Rahim, Rahman. 1984. Pribadi Bugis, Nilai-Nilai Utama di dalam Kebudayaan. Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin.

Sofyaningsih. 1989. Islamisasi di Kerajaan Soppeng. Skripsi Sarjana Fakultas Sastra. Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin.

Seksi Kebudayaan Kandep. Dikbud. Kabupaten Soppeng. Sejarah Singkat Kerajaan Soppeng.

Utomo, Cahyo Budi, Drs. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan. Semarang : IKIP Semarang Press.

## Lampiran 1

## SUSUNAN RAJA-RAJA SOPPENG

NO	NAMA RAJA	GELAR RAJA-RAJA	KETERANGAN
1	La Temmalala	Manurung ri sekkanyili	1300 - 1350
2	La Maracinna	-	1350 - 1358
3	Lamba	-	1358 - 1408
4	We Tekkawanua	-	1408 - 1438
5	La Makkanenga	-	1438 - 1468
6	La Makkarella	-	1468 - 1500
7	La Pawiscang	-	1500 - 1530
8	La Pasampoi	SorompaliE	1530 - 1534
9	La Mannuga	Towakkareng, Matinro ri Tanana	1534 - 1556
10	La'de	Mabolongnge	1556 - 1560
11	La Mataesso	Puang LipuE PatolaE	1560 - 1575
12	La Sekkati	MallajangngE ri agelleng	1575 - 1580
13	La Mappaleppe	PatolaE	1580 - 1601
14	BcoE	-	1601 - 1620
15	La Tenri Bali	Matinroe ri addatuana	1620 - 1654
16	We Adang	Matinroe ri Madello	1654 - 1666
17	Tenri Senge	Matinroe ri Salassana	1666 - 1696
18	La Patao	Ranreng Toa, Matinroe ri Nagauleng	1696 - 1714
19	La Padasejati	Matinroe ri Beula	1714 - 1721
20	La Pareppa	Matinroe ri somba Opu	1721 - 1722
21	La Padasejati	Matinroe ri Beula	1722 - 1727
22	Batara ri Toja	Matinroe ri Luwu	1727 - 1737
23	La Uddang ri Lau	Matinroe ri Musuna	1737 - 1742
24	Batara ri Toja	Matinroe ri Luwu	1742 - 1744
25	La Temma Senge	Matinroe ri Mallimongang	1744 - 1746
26	La Tongeng	Matinroe ri Launa	1746 - 1747
27	La Mappajanci	-	1747 - 1765
28	La Mappa Pole Onro	-	1765 - 1820
29	Tenria Waru	-	1820 - 1840
30	Tenri Yampareng	Matinroe ri Barugana	1840 - 1849
31	La Unru	Matinroe ri Tenggana Soppeng	1849 - 1850
32	La Onrong	-	1850 - 1858
33	To Lempeng	-	1858 - 1878
34	Abdul Gani	Matinroe ri PakkasaloE	1878 - 1895
35	Sitti Zaenab	-	1895 - 1940
36	Haji Andi Wana	-	1940 - 1957

Sumber : Dokumentasi Kasi Kebudayaan, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

Model Umum Pernyataan Pendek

(Korte Verklaring)

soerat Ikrar

Bahwa inilah ikrar saja  
,..... mengakoe tiga perkara  
jang terseboet ini iaioe :  
Fasal jang pertama :

Bermoela ikrar saja bahwa  
sesoenggoehnja ..... djadi  
soeatoe bahagian daripada Hindia  
Nederland, maka taloeklah ....  
itoe kepada kerajaan Blanda,  
maka wajiblah atas saja selama-  
lamanya bersetia kepada Baginda  
Seri Maharadja Blanda dan kepada  
wakil Baginda, ia-itoe Seri  
Padoeka jang dipertoean besar  
Goebornoer Djenderal Hindia  
Nederland, maka oleh Seri  
Padoeka jang dipertoean besar  
Goebornoer Djenderal dikaroenia-  
kan kepada saja djabatan  
pemerintahan di dalam .....

Fasal jang kedoea :

Bahwa mengakoelah dan  
berdjandjilah saja bahwa saja  
tiada akan membitjarakan soeatoe  
apa daripada hal ichwal saja  
dengan Radja-radja jang asing,  
melainkan moesoeh. Baginda Seri  
maharadja Blanda itoe moesoeh  
saja begitoe djoega sohabat Seri  
Maharadja Blanda itoe sohabat  
Saja adanja.

Verklaring

Ik ondergeteekende .....  
hoofd van het landschap .....  
..... verklar :

Ten eerste :

Dat het Landschap .....  
een gedeelte uitmaakt van  
Nederlandsch-Indie en derhalve  
staat onder de heerschappij van  
Nederland: dak ik mitsdein  
steeds getrouw zal zijn aan  
Hare Majesteit de Koningin der  
Nederlanden en aan Zijne Excel-  
lentie den Gouverneur Generaal  
als Hoogstderzelve vertegen-  
woordiger, uit wiens hadden ik  
het bestuur over ..... aanvard.

Ten tweede :

Dat ik mij en generlei  
staatkundigde aanrakingen zal  
stellen met vreemde mogendheden,  
zullenden de vijanden van  
Nederland ook mijne vijanden, de  
vrienden van Nederland ook mijne  
vrienden zijn.



Fasal jang ketiga :

Bahwa mengakoelah dan berdjandjilah saja bahwa se-soenggoehnya segala pengatoeran hal ichwal ..... baik jang telah diatoerkan baik jang akan diatoerkan oleh ataoe dengan nama Baginda Seri Maharadja Blanda ataoe Seri Padoeka jang dipertoen besar Goebernoer Djenderal Hindia Nederland ataoe wakilnya, semoea pengatoeran itoe saja hendak mendjalankan lagi segala perintah jang akan diperintahkan kepada saja baik oleh Seri Padoeka jang dipertoen besar Goebernoer Djenderal baik oleh wakilnya, semoea perintah itoe saja hendak menoeroetkan djuga adanya.

Demikianlah ikrar jang telah saja mengakoe dengan bersoempah di ..... pada ..... boelan ..... tahoen hidjrat ..... dan tersoerat tiga helai jang sama boenjinja.

Ten derde:

dat ik zal nakomen en hand haven alles regelingen, die met betrekking tot .... door of names de koningin der Nederlanden dan wel den Gouverneur General van Nederlandsch-Indie diens vertegenwoordiger zijn of zullen worden vastgesteld of toepasselijk verklaard en dat ik in het algemeen alle bevelen zal opvolgen, die mij door of names den Gouverneur Generaal of Diens vertegenwoordiger zijn of zullen worden gegeven.

Aldus gedaan en beeedigde  
..... den ..... of den .....  
der maand ..... van het  
Mohammedaansche jaar ..... en  
opgemaakt in drievoud.



In tegenwoordigheid van ...  
.....

Deze verklaring is goedge-  
keurd en bekrachtigd op den ....  
..... zijnde daarmede tevens  
..... erkend en bevestigd  
als van het landschap .....

De Gouverneur Generaal van  
Nederlandsch-Indie.

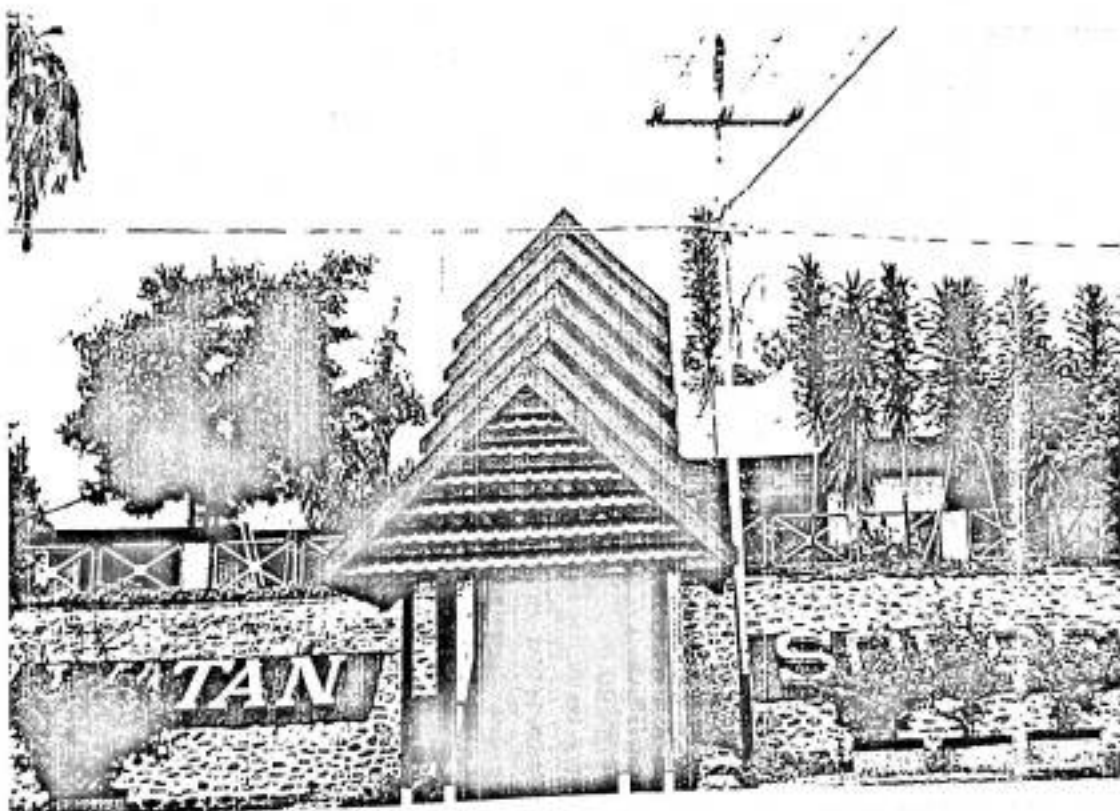
.....  
Ter ordonnantie van den Gouver-  
neur Generaal

De Algemeene Secretaris  
.....

---

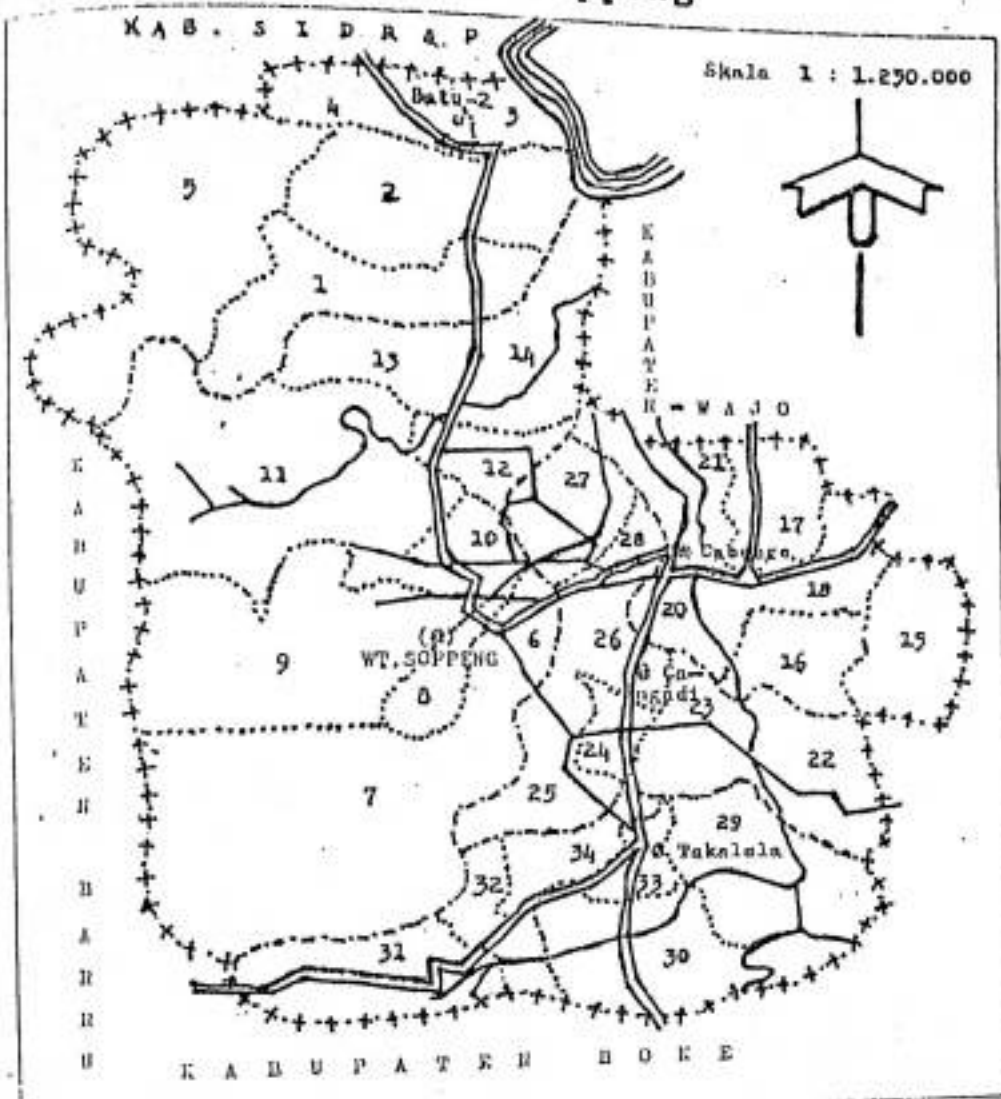
Dikutip sesuai dengan model Pernyataan Pendek dari J.M.  
Somer, De Korte Verklaring (Breda ; Corona, 1934), Lampiran  
VI. Somer menyatakan bahwa lampiran itu dikutip dari lampiran  
Nota IIB.

Lampiran 3



Istana Kerajaan Soppeng, terletak di tengah-tengah kota  
Watansoppeng sampai dewasa kini.

# Peta Kab. Soppeng



(G)	: Ibu Kota Kabupaten	1. Panincong	13. L. Bata Maja	24. Jonna E
⊙	: Ibu Kota Kecamatan	2. Atlangala	14. Loworong	25. Pattojo
++	: Batas Kabupaten	3. Limpajang	15. Abbanuang	26. Galung
- -	: Batas Kecamatan	4. Manorangala	16. Tetesatu	27. Gaara
...	: Batas Desa	5. Bulu E	17. Maringang	28. B e l o
==	: Jalan Propinsi	6. Maccile	18. Ujung	29. Bara E
---	: Jalan Daerah	7. L. Ellau	19. Mancure	30. Goari E
~	: Sungai	8. Botto	20. Pajaleang	31. Gatareng
		9. Billa	21. Lompalle	32. W a t u
		10. Ompo	22. Citta	33. T. Bara E
		11. Soli E	23. J a n p u	34. Labeani
		12. Donri-Donri		

Sumber : Diolah dari Catatan Kantor Statistik Dati II Soppeng, -

